

**PERAN DEWAN PENGAWAS DAN SATUAN PEMERIKSA
INTERNAL DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*
PADA SEKOLAH TINGGI DI LINGKUNGAN BPSDM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

***THE ROLE OF BOARD OF TRUSTEES AND INTERNAL AUDIT
UNIT IN ACHIEVING GOOD GOVERNANCE AT HIGH SCHOOL
IN THE ENVIRONMENT BPSDM MINISTRY OF
TRANSPORTATION***

INDAH NURAPRIANI PUTRIDARWANSARI

8335108446



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2011

ABSTRAK

Indah Nurapriani Putridarwansari, 2014: Peran Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksa Internal dalam Mewujudkan Good Governance Pada Sekolah Tinggi di Lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan.

Pembimbing : (1) Tri Hesti Utamingtyas, SE, M.SA, (2) Marsellisa Nindito, SE, Akt, M.Sc.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Peran Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksa Internal dalam Mewujudkan Good Governance Pada Sekolah Tinggi di Lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Dewan pengawas dan Satuan Pemeriksa Internal sebagai variable dependen. Sampel penelitian ini berdasarkan responden yang berada di Lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda pada tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa kedua variable bebas yaitu Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksa Internal berpengaruh terhadap Good Governance secara simultan. Kemudian hasil penelitian secara parsial juga menunjukkan bahwa Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksa Internal berpengaruh terhadap Good Governance.

Penelitian ini membuktikan bahwa dewan pengawas berpengaruh signifikan terhadap good governance dengan nilai t hitung 2,278 lebih besar dari t table 2,000. Satuan Pemeriksa Internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance dengan nilai t hitung 2,839 lebih kecil dari t table 2,000.

Kata kunci: Dewan Pengawas, Satuan Pemeriksa Internal, Good Governance

ABSTRACT

Indah Nurapriani Putridarwansari, 2014: The role of the Board of Trustees and the Internal Audit Unit in Achieving Good Governance at a high school in the Environment BPSDM Ministry of transportation.

Supervisor : (1) Tri Hesti Utamingtyas, SE, M.SA, (2) Marsellisa Nindito, SE, Akt, M.Sc.

The purpose of this research is to analyze the influence of understanding of Board of Trustees and the Internal Audit Unit in achieving of Good Governance at a high school in the Environment BPSDM Ministry of transportation. Many factors that tested in this research are board of trustees and Internal Audit Unit as independent variables and good governance as dependent variable. Sample of this research is obtained from in the environment BPSDM Ministry of Transportation. Data of this research is primary data. An analyze that used is multiple linier regression at significancy 5 %. As a result of testing on hypothesis, it shows that all independent variables like board of trustees and internal audit unit have effect to good governance in simultan. Whereas, a result of this research that only comprehension of board of trustees and internal audit unit have effect to good governance in partial.

This research proved that board of trustees have significant effect to good governance with t value 2.278 is bigger than t table 2,000. The Internal Audit Unit have significant effect to good governance with t value 2.839 is bigger than t tabel 2,000.

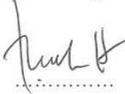
Keywords: Board of Trustees, Internal Audit Unit, Good Governance

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Dedi Purwana ES., M.Bus.
NIP. 19671207 19920 3 1001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak</u> NIP.19770617 200812 2 001	Ketua Penguji		18 Juni 2014
2. <u>Diana Noviarini SE, MM.Si</u> NIP. 19751115 20081 2 2002	Sekretaris		19 Juni 2014
3. <u>Rida Prihatni SE, Akt, M.Si</u> NIP. 19760425 20011 2 2002	Penguji Ahli		18 Juni 2014
4. <u>Tri Hesti Utamingtyas SE, M.SA</u> NIP.19760107 200112 2 001	Pembimbing I		18 Juni 2014
5. <u>Marsellisa Nindito SE, M.Sc, Akt, CA</u> NIP. 19750630 200501 2 001	Pembimbing II		19 Juni 2014

Tanggal Lulus 12 Juni 2014

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Juni 2014

Yang membuat pernyataan,



Indah Nurapriani Putridarwansari
8335108446

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Peran Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksa Internal dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Sekolah Tinggi Di Lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan”**. Proposal skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Keberhasilan menyelesaikan proposal skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi nikmat umur dan sehat sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini.
2. Ayah, Ibu, Mas Rio, Tante Nur, dan Uwa yang selalu memberi support, baik spirit dan materil, kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini.
3. Ibu Tri Hesti Utamingtyas, SE, M.SA dan Ibu Marsellisa Nindito, SE, M.Sc, Akt, CA selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis selama melakukan penulisan proposal skripsi ini.
4. Drs. Dedi Purwana E.S., M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Negeri Jakarta yang secara tidak langsung telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.

5. Bapak Indra Pahala, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
6. Ibu Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak, selaku Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
7. Seluruh dosen FE UNJ yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis duduk dibangku perkuliahan.
8. Sahabat penulis, Humaira, Deby, Bondan, yang selalu memberikan semangat, doa dan masukan-masukan yang baik.
9. Pihak lain yang telah memberikan doa, semangat, bantuan, dan lain-lain, yang tak dapat penulis sebutkan secara rinci.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga proposal skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Juni 2014

Indah Nurapriani Putridarwansari

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Abstrak Indonesia	ii
Abstrak Inggris	iii
Lembar Pengesahan	iv
Orisinilitas	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Lampiran	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Perumusan Masalah	9
E. Kegunaan Penelitian	10
Bab II Kajian Teoritik	
A. Deskripsi Konseptual	11
1. <i>Agency Theory</i>	11
2. <i>Good Governance</i>	17
3. Dewan Pengawas	26
4. Satuan Pemeriksa Internal	35
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	42
C. Kerangka Teoritik	44
D. Perumusan Hipotesis	46
Bab III Metodologi Penelitian	
A. Tujuan penelitian	47
B. Objek dan Ruang Lingkup penelitian	47
C. Metode penelitian	48
D. Populasi dan Sampling	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data	55
1. Statistik Deskriptif	55
2. Pengujian Kualitas Data	55

3. Uji Asumsi Klasik	56
4. Analisis Regresi Linear Berganda	59
5. Pengujian Hipotesis	60
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Deskripsi Unit Analisis	63
B. Hasil Penelitian.....	68
1. Pengujian Penelitian	68
a. Uji Validitas	68
b. Uji Reliabilitas	74
2. Statistik Deskriptif	75
3. Uji Asumsi Klasik	78
4. Uji Regresi Berganda	83
5. Uji Hipotesis	84
C. Pembahasan	89
BAB V Kesimpulan, Implikasi, dan Saran	
A. Kesimpulan	97
B. Implikasi	98
C. Saran	99
Daftar Pustaka	102
Lampiran-Lampiran	107
Riwayat Hidup	128

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Permohonan Kuesioner	107
Lampiran 2 Surat Perizinan Pengisian Kuesioner	108
Lampiran 3 Kuesioner	113
Lampiran 4 Uji Validitas	119
Lampiran 5 Uji Reliabilitas	122
Lampiran 6 Data Kuesioner	123
Lampiran 7 P-Plot Normalitas	126
Lampiran 8 Scatterplot	127

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Konsep GCG 18
Tabel 2.2	Hasil Penelitian yang Relevan 42
Tabel 3.1	Skala Pengukuran 49
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian 54
Tabel 4.1	Jumlah Responden 64
Tabel 4.2	Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner 65
Tabel 4.3	Jenis Kelamin 66
Tabel 4.4	Usia 67
Tabel 4.5	Lama Pengalaman Kerja..... 68
Tabel 4.6	Daftar Sekolah Tinggi Untuk Pengujian Validitas 69
Tabel 4.7	Uji Validitas 70
Tabel 4.8	Uji Reliabilitas 74
Tabel 4.9	Statistik Deskriptif 76
Tabel 4.10	Uji Normalitas 79
Tabel 4.11	Uji Multikolinearitas 81
Tabel 4.12	Uji Glejser 82
Tabel 4.13	Uji Regresi Berganda 83
Tabel 4.14	Uji Koefisien Determinasi 84
Tabel 4.15	Uji Parsial (T-test) 86
Tabel 4.16	Uji Pengaruh Simultan (F-Test)..... 88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Definisi <i>Agency Theory</i>	13
Gambar 2.2 Kerangka Teoritik	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini kita banyak disuguhkan masalah yang berakibat pada kerugian keuangan negara, terutama masalah mengenai pengawasan keuangan yang berada di pemerintahan. Salah satunya kasus yang melibatkan pejabat Negara Ketua Mahkamah Konstitusi dalam kasus dugaan pengurusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi serta tindak pidana pencucian uang dan melibatkan Anggota DPR dalam kasus korupsi anggaran di Kementerian Pendidikan Nasional.

Lalu masalah yang terjadi mengenai korupsi pesawat di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) dalam pengadaan pesawat latih sayap tetap (*Fixed Wing*) dan Link Simulator pada Badan Pendidikan dan Pelatihan STPI Tahun Anggaran 2010. Menyelidiki hal itu, penyidik memeriksa sejumlah saksi dan melakukan penyitaan. pengadaan pesawat latih sayap tetap (*Fixed Wing*) dan Link Simulator itu dilakukan secara *multiyears* dengan anggaran sebesar Rp138,8 milyar untuk 18 pesawat, 2 unit Link Simulator, beserta kelengkapannya, disertai surat-surat dan nomor registrasinya. Tapi kenyataannya, pesawat yang telah dirakit secara utuh hanya berjumlah 6 pesawat, sedangkan 12

pesawat sisanya belum dirakit. Padahal PT. Pasific Putra Metropiltan sebagai penyedia barang telah menerima pembayaran secara penuh (m.jurnas.com).

Begitu juga dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) tersandung kasus dugaan korupsi dana hibah daerah untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit. Berdasarkan hasil perhitungan BPKP Kalteng, diperkirakan telah merugikan negara sebesar Rp186 juta. Kasus ini terungkap berawal dari laporan sejumlah dosen STIE Sampit terkait adanya dugaan penyelewengan atas dana hibah dari pemerintah daerah. Dalam laporan mereka, sejumlah dosen menyebutkan laporan pertanggungjawaban (LPj) dana bantuan Pemkab Kotim pada 2008 dan 2009 dengan total dana Rp200 juta lebih telah disalahgunakan (www.borneo.com).

Semakin banyaknya kasus yang terjadi maka diperlukan sikap transparansi dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) di setiap pemerintahan. Tuntutan transparansi dan akuntabel disebut dengan *Good Governance*.

Good Governance merupakan prinsip yang sangat dianjurkan untuk digunakan karena di dalam prinsip *Good Governance* ini mendorong tata pemerintahan yang baik untuk lebih transparansi dalam mengelola keuangannya sehingga tidak perlu ada lagi laporan yang dirahasiakan supaya semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dapat diperlihatkan atau mudah di akses sehingga laporan keuangannya dapat dipercaya dan menjadi lebih akurat.

Oleh karena itu betapa pentingnya penerapan *Good Governance* ini apabila organisasi yang mengelola keuangannya dengan mengikuti semua peraturan

pemerintah maka dapat mengurangi kasus-kasus korupsi yang sering terjadi. Karena banyak organisasi di Indonesia yang menganut *Good Governance*, tetapi tidak secara serius dan tidak sungguh-sungguh berkomitmen untuk melaksanakannya.

Sekolah Tinggi sebagai instansi pemerintah sangat memerlukan pendampingan dari BPKP dalam mewujudkan *Good Governance*. Dengan adanya paradigma baru di lingkungan BPKP selaku Auditor Internal, bahwa peran Auditor Internal tidak lagi sebagai *watchdog*, namun lebih ke arah *consultant*, bahwa sikap internal auditor tidak lagi super-ordinasi/sub ordinasi namun *equal* yang mana hal-hal semacam ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas.

Terdapat pula masalah yang terjadi di SPI, contohnya yang terjadi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berupaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI untuk Laporan Keuangan tahun 2013. Dalam lima tahun terakhir, laporan audit BPK-RI memberi opini *Disclaimer* (2006 & 2007) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (2008-2012). Permasalahan yang menjadi catatan BPK-RI antara lain lemahnya Sistem Pengendalian Intern dalam pelaksanaan belanja DIPA dan kurangnya kepatuhan para bendahara pengeluaran terhadap kewajiban perpajakan.

Badan Pemeriksa Keuangan RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dengan memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Kementerian

Perhubungan Tahun 2009. Dengan opini tersebut, BPK menilai Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2009 telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian Perhubungan tanggal 31 Desember 2009 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak tidak disajikannya aset tetap berupa tanah berdasarkan inventarisasi dan hasil penilaian kembali serta piutang bukan pajak berupa jasa kenavigasian, jasa perkapalan, jasa kepelabuhanan dan jasa kebandarudaraan berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan yang memadai Laporan hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan temuan mengenai kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan (www.bpk.go.id).

Memang tidak mudah untuk menjadi organisasi yang mengikuti semua aturan yang dibuat pemerintah supaya menjalankan prosedur yang sudah ada serta bertanggungjawab kepada pemangku kepentingan, masyarakat, dan negara, karena di dalam sebuah organisasi pasti ada suatu kepentingan yang tercipta antara pemilik kepentingan dan yang ingin memiliki kepentingan. Kondisi ini sering terjadi akibatnya muncullah suatu konflik yang menimbulkan persaingan antara pemangku kepentingan yang disebut *stakeholder* dan yang ingin memiliki kepentingan yang disebut manajer. Dengan adanya konflik kepentingan ini maka informasi yang diterima oleh masing-masing pihak (*stakeholder* dan manajer) menjadi tidak seimbang.

Ketidakseimbangan antara *stakeholder* dan manajer terjadi pada informasi yang diterima oleh masing-masing pihak. Informasi yang diterima oleh *stakeholder* tentu tidak sebanyak dengan yang diterima oleh manajer karena kedudukan seorang manajer lebih sering berada di kantor daripada *stakeholder*, jadi manajer lebih *detail* untuk mengetahui kejadian apa saja yang terjadi di kantor dibanding dengan *stakeholder* yang berada di kantor yang hanya ingin mengetahui mengenai laporan keuangan organisasinya.

Belum lagi seorang manajer pasti mempunyai kepentingan tersendiri yang tidak ingin diketahui oleh *stakeholder*. Agar konflik kepentingan dapat diminimalisir maka perlu diterapkan pengelolaan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) sesuai peraturan perundang-undangan, dan supaya mengurangi penyimpangan yang sering terjadi maka perlu adanya suatu kontrol manajemen dalam organisasi supaya pengelolaan keuangannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tidak hanya menerapkan *good governance* tetapi perlu ditegakkan suatu sistem yaitu Sistem Pemeriksa Internal (SPI). Adanya SPI yang kuat maka penyimpangan pun dapat di minimalisir. Pihak yang dianggap berperan dalam SPI adalah auditor internal.

Tugas auditor internal tidak hanya mencakup audit keuangan saja tetapi juga audit operasional, dengan demikian profesi ini bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan organisasi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain profesi internal auditor juga terdapat dewan pengawas yang bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh manajemen

dan auditor dalam mengelola laporan keuangannya. Dewan pengawas selain melakukan evaluasi dan pengawasan, seorang Dewan Pengawas juga dituntut untuk dapat memberikan nasihat, saran, dan tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja kepada pejabat pengelola keuangan.

Keberadaan Dewan Pengawas di suatu organisasi merupakan pihak eksternal yang sangat dibutuhkan, karena Dewan Pengawas memiliki beberapa hal yang harus dicermati adalah (1) Efektivitas Pengukuran dan Penilaian Kinerja terkait: Kinerja Layanan, Kinerja Keuangan, dan Kesesuaian dengan Rencana Strategi Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal (2) Optimalisasi PNBK terkait penggalan sumber pendapatan BLU dan penerapan Tarif Layanan yang Komprehensif; (3) Efisiensi Belanja meliputi kesesuaian dengan aturan, kelayakan dan kepatuhan, dan penerapan standar biaya yang sesuai. Terkait Laporan Keuangan, beberapa hal yang perlu dicermati oleh Dewan Pengawas adalah: Ketepatan dan Kelengkapan Laporan Keuangan BLU, Penyajian dan Pengungkapan Per Pos Neraca, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Kesesuaian antar Laporan Keuangan. Sedangkan dalam penyusunan Dewan Pengawas, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: (1) Urgensi Penyusunan Laporan Dewan Pengawas; (2) Sistematika Laporan Dewan Pengawas; dan (3) Waktu Penyampaian Laporan Dewan Pengawas (www.ppkblu.depkeu.go.id).

Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa menerapkan *Good Governance* di setiap organisasi sangat dibutuhkan guna menciptakan peraturan pemerintah yang sesuai dengan aturan yang berlaku agar terciptanya

pengelolaan keuangan yang sehat. Jika berbicara mengenai sehat atau tidaknya suatu laporan keuangan, tentunya dibutuhkan juga pola pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aktivitas apa yang sehari-hari, apakah pengeluaran keuangan yang dikeluarkan bermanfaat atau tidak setelah itu dicatat di laporan keuangan.

Penggunaan atau manfaat pengeluaran keuangan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi sangat penting untuk diperhatikan karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik yang tidak hanya mencari keuntungan semata. Perguruan tinggi merupakan salah satu pelayanan jasa di bidang pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dan tidak mencari keuntungan. Pendidikan tinggi pada praktiknya dijalankan oleh institusi sekolah tinggi/perguruan tinggi yang dimaksudkan untuk melahirkan komunitas yang mampu menularkan inovasi-inovasi dan pemikiran-pemikiran baru dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Permasalahan yang dihadapi dapat memberikan pembelajaran bagi pemerintah supaya dapat menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum serta menerapkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab.

Memang sudah seharusnya perguruan tinggi menggunakan pola pengelolaan keuangan seperti ini, karena BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Pasal 1 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara).

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha (Pasal 1 Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER/MBU/2011 tentang Penerapan GCG).

Dengan demikian, menerapkan *Good Governance* pada perguruan tinggi/sekolah tinggi dapat membantu pemerintah dalam mencegah terjadinya kecurangan/penyimpangan. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Peran Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) dalam mewujudkan *Good Governance* pada Sekolah Tinggi di Lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan.**

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Banyak kasus penyimpangan dalam pelaksanaan keuangan negara akibat lemahnya SPI oleh karena itu dibutuhkan penerapan *good governance*.
- 2) Laporan keuangan yang dirahasiakan menuntut organisasi untuk menerapkan *good governance*.
- 3) Terciptanya konflik kepentingan antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan manajer (sebagai pelaksana) dalam organisasi.

- 4) Perlu ditegakkan Sistem Pemeriksa Internal (SPI), dalam hal ini yang dianggap berperan dalam melaksanakan sistem adalah Auditor Internal.
- 5) Pentingnya Dewan Pengawas sebagai perwakilan pemerintah yang berperan untuk mengawasi Pejabat Pengelola BLU.
- 6) Adanya penyimpangan pelaporan keuangan di organisasi pemerintah

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti lebih dititikberatkan pada peran Dewan Pengawas dan SPI sebagai upaya mewujudkan *good governance*.

D. Perumusan Masalah

- 1) Apakah peran Dewan Pengawas berpengaruh dalam upaya mewujudkan *Good Governance* pada Sekolah Tinggi di Lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan.
- 2) Apakah peran Satuan Pemeriksa Internal (SPI) berpengaruh dalam upaya mewujudkan *Good Governance* pada Sekolah Tinggi di Lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teori, apabila peran Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksa Internal dapat dilaksanakan dengan benar, maka akan menciptakan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, maka dapat dijadikan sebagai rujukan untuk Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksa Internal dalam melaksanakan *good governance*.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi konseptual

Upaya dalam mewujudkan *good governance* adalah untuk menghindari konflik kepentingan yang terjadi antara *stakeholder* dan manajer di suatu organisasi.

1. Agency Theory

a. Definisi Agency Theory

Disamping menerapkan *good governance*, timbullah masalah keagenan sebagai pendorong penerapan *good governance*.

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara agen (pihak manajemen suatu perusahaan) dengan prinsipal (pemilik). Pemegang saham atau *principal* merupakan pihak yang memberikan amanat kepada agen untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal*, sementara *agent* adalah pihak yang diberi mandat (Jansen dan Meckling, 1976 dalam Tinambunan, Zulfikar, Ibrani).

Prinsip utama teori keagenan menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer dalam bentuk kontrak

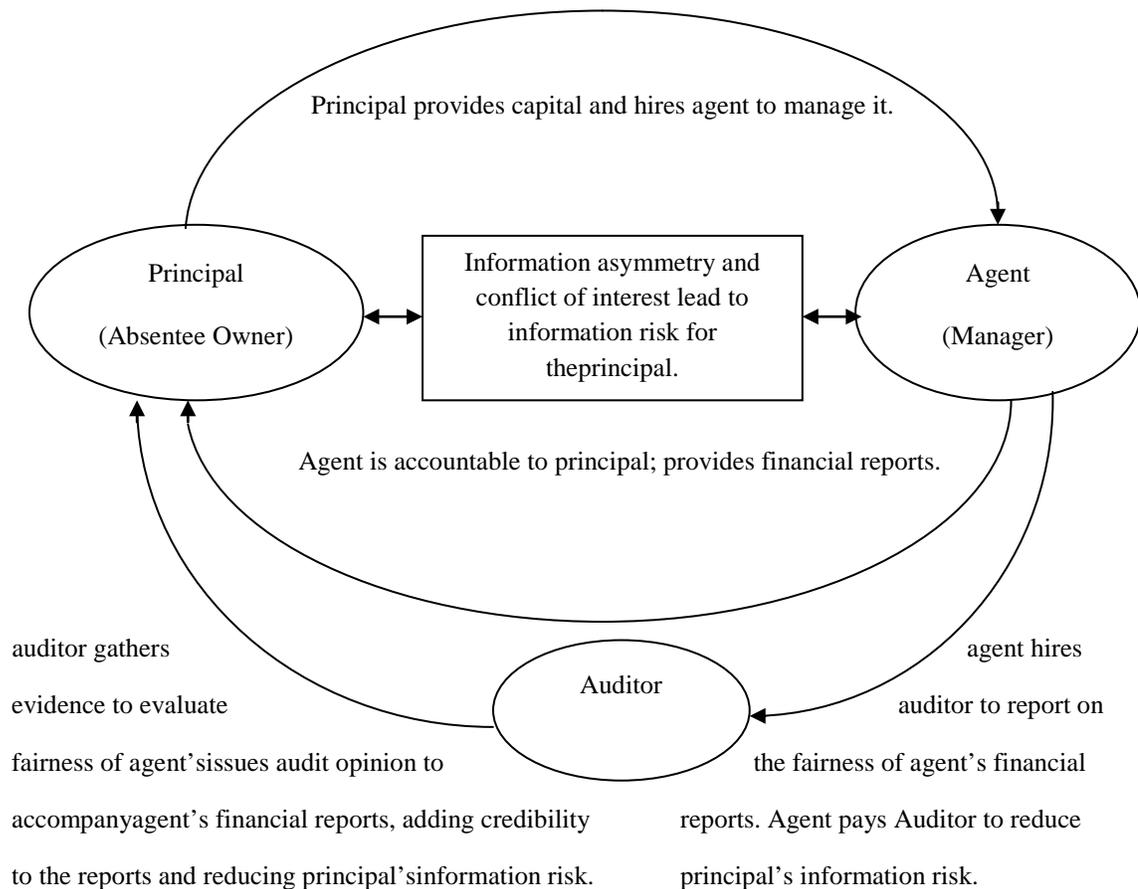
kerja sama. Teori keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan, sehingga masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Jika pihak-pihak tersebut bertindak untuk kepentingannya sendiri, maka hal tersebut akan menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen (Zubaidah, Achmad, Jati, 2013)

Menurut Scott (1997) dalam Tinambunan, Zulfikar, Ibrani (2013), inti dari *agency theory* adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan.

Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan suatu teori yang berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, teori organisasi, dan teori sosiologi yang menjelaskan hubungan antara *Principal* dan *Agent* dalam menganalisis susunan kontraktual diantara dua individu atau lebih, kelompok, ataupun organisasi (Halim dan Abdullah, 2006 dalam Hasan, Rimawati, Hayadi, 2013).

Pendelegasian wewenang menurut Lupia dan McCubbins (2000) dalam Halim dan Abdullah (2006) dalam Hasan, Rimawati, Hayadi (2013) memiliki ciri, (1) adanya *principal* dan *agent*, (2) menimbulkan konflik kepentingan, (3) adanya informasi asimetrik, dan (4) adanya usaha *principal* untuk mengurangi masalah keagenan.

Teori agensi menurut Messier, Glower dan Prawitt (2010:7) menjelaskan dengan membuat sebuah peta konsep sebagai berikut:



Gambar II.I

Asimetri informasi dan konflik kepentingan menyebabkan risiko informasi untuk *principal*. *Principal* menyediakan modal dan menyewa agen untuk mengelolanya. Agen bertanggung jawab kepada prinsipal, memberikan laporan keuangan. Agen meng*hire*/menyewa auditor untuk melaporkan kewajaran laporan keuangan agen. Agen membayar Auditor

untuk mengurangi risiko informasi. Auditor mengumpulkan bukti-bukti untuk mengevaluasi kewajaran pendapat masalah audit agen untuk dijadikan laporan keuangan agen, menambahkan kredibilitas untuk laporan dan mengurangi risiko informasi *prinsipal*.

Chrisdianto (2013) mengungkapkan:

“Teori keagenan yaitu hubungan yang dibentuk di mana ada satu pihak yang berposisi sebagai agen dan ada satu pihak lain yang berposisi sebagai *principal*. Agen merupakan pihak yang diberi kepercayaan serta harus bertanggung jawab kepada *principal* sebagai pihak yang memberikan tanggung jawab. Manajemen perusahaan adalah pihak agen sedangkan pihak-pihak lain seperti: investor, kreditor, masyarakat dan pemerintah adalah bagian dari *principal*”.

Jansen dan Meckling (1976) dalam Sari dan Raharja (2010) menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (*agent*) dengan pemegang saham (*shareholders*) dan konflik tersebut menjadi pemicu perhatian manajemen (Wayan, 2010).

“Pihak manajemen dalam hal ini manajemen kurang dipercaya oleh *stakeholder* karena benturan kepentingan. Manajemen cenderung memperlihatkan kondisi yang baik di dalam organisasi untuk pencapai pribadi. “Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku” (Wolfenshon, 1999)”.

Masalah GCG berakar dari pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Jensen dan Meckling (1976) dalam teori keagenan, yang disebut dengan *principal* adalah pemegang saham atau pemilik dan *agent* adalah manajemen atau manajer yang mengelola perusahaan. Secara umum tujuan manajemen dan pemegang saham biasanya tidak berbeda. Masalah muncul ketika terdapat informasi yang bersifat asimetri, baik yang berupa kegiatan tersembunyi maupun informasi tersembunyi. Sistem GCG yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasi dengan wajar dan bernilai tinggi (Farina dan Hermawan, 2013).

Fama dan Jansen (1983) dalam Setyaningrum dan Diyanty (2013) menyatakan bahwa Dewan Pengawas merupakan mekanisme pengendalian internal yang paling kuat untuk memonitor tindakan direktur dalam hubungannya dengan masalah keagenan yang terjadi karena pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian kebijakan.

Dewan Pengawas sebagai organ organisasi bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur serta memastikan bahwa organisasi melaksanakan *Good Corporate Governance* (Zarkasyi, 2008:96)

Teori Keagenan merupakan teori utama atas pemanfaatan jasa Satuan Pengawas Internal oleh Instansi. Dalam kaitannya dengan SPI, teori ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan para *stakeholder*, membuat pentingnya Satuan Pengawas Internal di kalangan instansi BLU. Kecenderungan dari pihak manajemen BLU yang menginginkan keuntungan pribadi, akan membuat dana yang diperoleh dari pemerintah mudah disalahgunakan. Manajemen instansi merupakan pegawai yang dapat dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola segala aset negara. Oleh karena itu BLU merupakan instansi milik pemerintah, BLU mendapatkan bantuan dana pengelolaan dari pemerintah melalui APBN maupun APBD dengan tujuan peningkatan pelayanan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat secara luas. Dengan untuk mengelola aset dan keuangan negara, agar tercipta suatu tujuan dari BLU tersebut secara efektif dan efisien. Ketika pihak manajemen mampu menempatkan diri sebagai agen yang baik, maka sudah tentu *Good Governance* dapat tercapai (Sari dan Raharja, 2010).

Teori ini bukan hanya menguatkan pelaksanaan *Good Governance* saja, tetapi mempertegas lagi bahwa pelaksanaan *Good Governance* perlu ditunjang dengan adanya penerapan Dewan Pengawas dan SPI.

2. *Good Governance*

a. *Definisi Good Governance*

Jika dilihat dalam arti bahasa yaitu *Good* berarti baik, sehat atau tidak sakit, *Governance* berarti pemerintahan. *Good governance* adalah praktik yang baik. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang sehat. Sebuah pemerintahan yang baik yang tidak mengandung masalah dan terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Agoes (2009:101) memberikan definisi mengenai *good corporate governance* adalah

“GCG merupakan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, Pemegang Saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Zarkasyi (2008:36) menerangkan *good governance* sebagai berikut:

“GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi terciptanya tujuan perusahaan.”

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN, Pasal 1, “GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan

mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”

Sedangkan menurut Prakarsa dalam Agoes (2009:102) mengatakan bahwa GCG adalah,

“... mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholders*) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja (*framework*) yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.”

b. Konsep *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance memiliki konsep-konsep yang perlu dipelajari lebih lanjut, berikut konsep-konsep *good corporate governance* menurut para ahli.

Agoes (2009:103) menerangkan konsep *good corporate governance* dengan membuat tabel yang pada intinya mengandung pengertian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Konsep GCG

1. Wadah	Organisasi (perusahaan, sosial, pemerintahan)
2. Model	Suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan termasuk prinsip-prinsip, serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat.

3. Tujuan	Meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi, meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan
4. Mekanisme	Mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab (dalam arti sempit: antarpemilik/pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Dalam arti luas: antar seluruh pemangku kepentingan)

Sumber: Agoes, (2009:103)

Konsep *good corporate governance* merupakan turunan dari konsep tata kelola pemerintahan yang lebih umum *good governance*. Konsep *good corporate governance* saat ini sedang menjadi *mainstream* dalam penyelenggaraan perusahaan publik. Karena perguruan tinggi secara konsep ekonomi pendidikan merupakan industri, maka *good corporate governance* dapat dan tepat diterapkan pada perguruan tinggi. GCG pada perguruan tinggi diperlukan untuk mendorong terciptanya efisiensi, transparansi dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha

(termasuk perguruan tinggi) sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai *stakeholder* dan pengguna produk/jasa dunia usaha (Muhi, 2010).

c. Prinsip-prinsip GCG

Prinsip-prinsip GCG menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN pasal 3, meliputi:

1. Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (*Independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Tjokroamidjojo (2006:130) menjelaskan prinsip-prinsip utama

Good Governance:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)
Tanggung gugat dari pengurusan/penyelenggaraan dari *governance* yang dilakukan.
2. Transparansi (*Transparency*)
Transparansi yaitu dapat diketahuinya oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijaksanaan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha.
3. Keterbukaan (*Openess*)

Pemberian informasi secara terbuka, terbuka untuk *open free suggestion*, dan terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai merupakan partisipasi untuk perbaikan.

4. Aturan Hukum, *Legalitas (Rule of Law)*
Keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat, pihak ketiga dilakukan berdasar hukum (peraturan yang sah).
5. Ada yang menambahkan jaminan fairness, *a level playing field* (perlakuan yang adil/perlakuan kesetaraan). Ini berlaku bagi pemerintah kepada masyarakat dalam pelayanan publik, perusahaan kepada pelanggan dan lain sebagainya.

Sedangkan asas GCG menurut Zarkasyi (2008:39), yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)
Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. Responsibilitas (*Responsibility*)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. Independensi (*Independency*)
Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)
Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

d. Karakteristik *Good Corporate Governance*

Terciptanya *good corporate governance* di suatu organisasi perlu didukung dengan adanya karakteristik.

Menurut Rewansyah (2010:95), kalau ditinjau karakteristiknya *good governance* memiliki delapan karakteristik, yaitu: “*Participation, rule of law, transparency, responsiveness, concensus oriented, equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency, accountability*”.

Sedangkan menurut UNDP (2007:8) yang dikutip oleh Soetjipta (2013) karakteristik-karakteristik *good governance* adalah:

1. *Equity*, semua orang, laki-laki, perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.
2. Supremasi hukum, dalam Negara yang mengatur adalah hukum yang adil, fair dan tidak memihak. Semua orang termasuk pemerintah harus tunduk kepada aturan-aturan hukum.
3. Transparansi, proses pengambilan keputusan harus terbuka, dan ada akses yang sama terhadap segala informasi terhadap masyarakat.
4. Akuntabilitas, proses pengambilan keputusan harus bisa dimonitor dan dikritisi, yaitu para pengambil keputusan harus dapat mempertanggungjawabkan.
5. *Responsiveness*, semua instansi dan lembaga mendengar, mempertimbangkan dan merespon tuntutan-tuntutan masyarakat dan opini publik yang berkembang.
6. Partisipasi sebanyak mungkin dari masyarakat, langsung atau tidak langsung, terjadi dalam proses pengambilan keputusan publik.
7. *Effectiveness*, keseluruhan proses pengambilan keputusan berlangsung dengan cara-cara yang cepat, murah dan sederhana.

e. Tujuan *Good Corporate Governance*

Untuk mendukung penerapan GCG yang sehat organisasi perlu membuat suatu pencapaian atau tujuan yang akan dicapainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Sedangkan tujuan penerapan GCG menurut Tunggal (2012:652) adalah:

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab dan adil.
2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara professional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan.
3. Mendorong agar organ perusahaan dalam membantu dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder's value*).

f. Manfaat *Good Corporate Governance*

Selain dengan adanya tujuan dan prinsip, jika *good governance* diterapkan secara komitmen maka akan memberikan manfaat dengan adanya penerapan *good governance* ini.

Manfaat GCG menurut Tjager dkk (2003) yang dikutip oleh Agoes (2009:106) mengatakan bahwa paling tidak ada lima alasan mengapa penerapan GCG itu bermanfaat, yaitu:

1. Para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG.
2. Ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan.
3. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG.
4. Sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah.
5. Secara teoritis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Manfaat *corporate governance* menurut Tunggal (2012:425) :

- a. Meminimalkan *Agency cost*
- b. Meminimalkan *Cost of Capital*

- c. Meningkatkan Nilai Saham Perusahaan
- d. Mengangkat Citra Perusahaan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan suatu organisasi yang menerapkan *good governance* dapat mengurangi terjadinya konflik kepentingan antara manajer dan *stakeholder* dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG: memberikan/mengungkapkan informasi secara terbuka, kinerja perusahaan dapat diukur/dipertanggungjawabkan, memiliki kesesuaian pengelolaan keuangan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan, memberikan keadilan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan. Adanya karakteristik, manfaat, dan tujuan GCG maka dapat mendorong organisasi untuk selalu berkomitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Dengan demikian, tata pengelolaan pemerintah yang baik dan sehat pun akan terwujud.

3. Dewan Pengawas

a. Definisi Dewan Pengawas

Penerapan *Good Governance* menjadikan organisasi menjadi lebih sehat didukung dengan adanya Dewan Pengawas yang berperan untuk mengawasi kegiatan yang ada di organisasi.

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 mengenai definisi dewan pengawas “Dewan Pengawas BLU, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU”.

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertindak sebagai wakil dari pemilik perusahaan yang mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Peran monitoring yang efektif dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat mencegah manajemen menyajikan laporan keuangan yang berkualitas rendah. Dengan demikian diharapkan keefektifan Dewan Komisaris dapat melakukan peran monitoring yang lebih baik sehingga manajemen atau agen akan bertindak lebih hati-hati dan lebih transparan dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan sehingga tindakan ekspropriasi yang dilakukan oleh manajemen atas *principal* yang dilakukan melalui laporan keuangan dapat dihindari (Hermawan 2009 dalam Setyaningrum dan Diyanty, 2013).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 23 tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas menjelaskan pengertian dewan pengawas sebagai berikut: “Dewan pengawas adalah organ pada UPT yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UPT PK-BLU”.

Pengawasan atau pengendalian didefinisikan sebagai suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan balik informasi; untuk membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan itu; menentukan apakah ada penyimpangan tersebut; dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi telah digunakan dengan cara paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan organisasi (Suhendi 2010).

b. Persyaratan dan Pembentukan Dewan Pengawas

Untuk menjadi seorang yang dapat mengawasi jalannya kegiatan suatu organisasi, Dewan Pengawas memiliki persyaratan dan pembentukan Dewan Pengawas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 pasal 3 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum menjelaskan persyaratan Dewan Pengawas sebagai berikut:

“Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang di antara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas”.

Darise (2009:266) mengungkapkan masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali

masa jabatan berikutnya. Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya, apabila:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BLU; atau
- d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLU.

c. Keanggotaan Dewan Pengawas

Dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya, memiliki syarat yang khusus untuk menjadi anggota Dewan Pengawas.

Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas. Syarat minimal dan jumlah anggota dewan pengawas mengikuti peraturan yang ditetapkan Menteri Keuangan (Darise, 2009:266).

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (KNKG, 2006) dalam Farina dan Hermawan (2013),

“Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Jumlah anggota dewan merupakan faktor penting dalam efektifitas peran dewan“.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum menjelaskan keanggotaan Dewan Pengawas:

- a. Memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLU, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian negara.

d. Tanggung Jawab dan Tugas Dewan Pengawas

Agar terwujudnya organisasi yang lebih baik, dalam pengawasannya Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab dan tugas yang harus dipenuhi.

Tanggung jawab Dewan Pengawas dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang tercantum pada terlaksananya dengan baik kontrol internal dan manajemen risiko, tercapainya imbal hasil (*return*) yang optimal bagi pemegang saham, terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar, terlaksanakannya kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi (Zarkasyi, 2008:95).

Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan supervisi atas semua kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan pertimbangan (*advices*) jika dibutuhkan. Untuk meningkatkan efektifitas dan transparansi, diharapkan paling tidak 20%

anggota dewan pengawas berasal dari luar perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan Direksi dan tidak di bawah kendali Pemegang Saham (Tunggal, 2012:421).

Menurut Darise (2009:266) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sehingga berkewajiban:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU dan memberikan pendapat serta saran kepada Menteri mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU
- c. Melaporkan kepada Menteri tentang kinerja BLU
- d. Memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLU
- e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLU; dan
- f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

Menurut Zarkasyi (2008:96) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagai organ perusahaan/organisasi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta untuk memastikan bahwa Perusahaan/organisasi melaksanakan GCG. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- (1) Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- (2) Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.

- (3) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai Dewan Pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG (Zarkasyi, 2008:100).

Tugas Dewan Pengawas menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG yang baik pasal 12 sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. Sedangkan Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada Direksi”.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum tugas dan kewajiban dewan pengawas:

Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan Pemerintah Pusat berkewajiban:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU;
- b. Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU;
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU;
- d. Memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam melaksanakan pengelolaan BLU; dan
- e. Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU kepada Pejabat Pengelola BLU.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas mempunyai tugas:

Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UPT PK-BLU, yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola UPT-BLU mengenai pelaksanaan:

- a. Rencana Strategis Bisnis;
- b. Rencana Bisnis dan Anggaran; dan
- c. Peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Dewan Pengawas menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan Pejabat Pengelola UPT PK-BLU;
- b. Melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala penurunan kinerja UPT PK-BLU;
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan UPT PK-BLU, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan UPT PK-BLU;
- d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola UPT PK-BLU dalam melaksanakan pengelolaan UPT PK-BLU; dan
- e. Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja UPT PK-BLU kepada Pejabat Pengelola UPT PK-BLU.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pasal 14 menyatakan bahwa: “Rapat Dewan Pengawas harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi”.

Dewan komisaris/Dewan Pengawas yang aktif mengadakan pertemuan secara rutin, sehingga mengetahui permasalahan lebih dini dan melakukan pengawasan lebih sistematis. Penelitian Xie et al.(2003) dan Zhou dan Chen (2004) menemukan dewan board yang sering mengadakan rapat akan mengurangi terjadinya manajemen laba (Farina dan Hermawan 2013).

e. Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas tentunya mempunyai batasan-batasan atau larangan untuk mengambil keuntungan pribadi.

Anggota Dewan Pengawas dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMN yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah (Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG).

f. Organ Pendukung Dewan Pengawas

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas membutuhkan komite-komite guna mendukung pelaksanaan tugasnya.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG menjelaskan dalam pasal 18 tentang Organ Pendukung Dewan Pengawas:

- (1) Organ Pendukung Dewan Pengawas, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Dewan Pengawas, jika diperlukan;
 - b. Komite Audit;
 - c. Komite Lainnya, jika diperlukan
- (2) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari namun tidak terbatas pada Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pengembangan Usaha.
- (3) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari anggota Dewan Pengawas.

Komite Audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris (atau

Dewan Pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi (Tunggal, 2012 :106).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan Peran Dewan Pengawas dalam rangka mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintah yang baik memiliki peran yang sangat aktif untuk mengawasi pengelolaan keuangan. Karena untuk menjadi anggota Dewan Pengawas harus memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan keuangannya serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dalam memberikan nasihat, masukan/saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja. Maka dari itu, dengan adanya Dewan Pengawas di suatu organisasi memberikan tata kelola pemerintah yang sehat.

4. Satuan Pemeriksa Internal (SPI)

a. Definisi Satuan Pemeriksa Internal

Peran auditor internal dapat membantu organisasi untuk memeriksa laporan keuangan di setiap kegiatan operasional organisasi. Sekelompok organisasi ini biasa disebut Satuan Pemeriksa Internal.

Satuan pemeriksa intern atau yang sering disebut dengan audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota

manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawaban dengan cara menyediakan analisis, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditelaah (Sitompul, 2008:18 dalam Puspitarini dan Anisykurlillah, 2013).

Definisi Audit Internal menurut Kaunang (2012:5) sebagai berikut:

“Auditor harus bersikap bebas (*independent*) untuk mereview dan menilai kebijaksanaan, rencana-rencana, dan prosedur serta catatan-catatan yang ada, sehingga auditor yang melakukan penilaian dan review harus terbebas dari pekerjaan rutin dalam organisasi perusahaan sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka“.

Sedangkan definisi Audit Internal menurut *The Board of Directors of Institute Of Internal Auditors* (IIA) yang dikutip oleh Tunggal (2012:270) sebagai berikut:

“Auditors Internal is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve on organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve effectiveness of risk management, control, and governance processes”.

Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanannya pada manajemen (Hery 2013:234).

Lawrence (2005) yang dikutip oleh Kusmayadi (2012) menjelaskan bahwa auditor internal adalah

“Sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol untuk menentukan informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi, peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang biasa diterima telah diikuti, kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi, sumber daya sudah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan tujuan organisasi telah dicapai secara efektif”.

Mulyadi (2002:29) dalam Puspitarini dan Anisykurlillah, 2013) menyatakan bahwa

“Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.

Auditor internal haruslah memiliki sikap/penilaian yang independen dalam melaporkan kondisi keuangan organisasi, memberikan keyakinan bahwa perusahaan dapat atau tidak mengelola risiko dengan baik, memberikan manfaat bagi organisasi dari jasa yang diberikan sesuai kebutuhan, memberikan cara pandang yang baik sehingga lebih baik dan bukan untuk menyelidiki orang, mempunyai suatu standar yang profesional yang jelas sehingga perusahaan dapat mengharapkan auditornya untuk menerapkan

pendekatan yang sistematis dan disiplin serta mampu mengendalikan risiko agar tujuan organisasi tercapai. Sekelompok organisasi auditor internal yang bertugas dalam organisasi biasa disebut Satuan Pemeriksa Internal (SPI).

b. Fungsi SPI

Sebagai Auditor internal yang memberikan penilaian kepada suatu organisasi SPI memiliki beberapa fungsi.

Menurut Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG :

Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
- b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

Fungsi audit internal menurut Tugiman (2001:21) yang dikutip oleh Soetjipta adalah:

“Fungsi audit intern yang independen dapat membantu manajemen secara efektif dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan atas kejadian dalam suatu perusahaan. Fungsi audit intern juga menjamin bahwa kondisi dan kejadian yang dilaporkan adalah benar, sehingga tindakan dan pengambilan keputusan manajemen dapat dilakukan sebaik-baiknya maka diperlukan suatu laporan yang menggambarkan kegiatan yang terjadi dalam suatu perusahaan, sehingga hasil suatu perusahaan akan tercermin dalam laporan tersebut”.

c. Tugas SPI

Menurut Dewi (2010) yang dikutip oleh Sumadyo (2013) menjelaskan sebagai berikut:

“Tugas internal auditor adalah tidak hanya mencakup audit keuangan saja tetapi juga audit ketaatan dan operasional perusahaan, dengan demikian profesi ini bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan agar dapat berjalan efektif”.

Menurut Hery (2013:229) beberapa tugas auditor internal lainnya yang sejalan dengan manfaat yang akan diperoleh dari diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik:

1. Auditor internal berkewajiban membantu manajemen dalam mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Dalam hal ini, perlu bagi auditor internal untuk memastikan bahwa dalam kegiatan operasional perusahaan tidak terjadi pemborosan (inefisiensi) yang tidak perlu.
2. Auditor internal berkewajiban untuk memastikan adanya pengamanan yang memadai atas keberadaan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan.
3. Auditor internal juga harus dapat mengambil tindakan *preventive* (pencegahan) atas kemungkinan terjadinya penyimpangan, kasus penipuan (korupsi) yang dilakukan karyawan maupun manajemen dalam perusahaan.
4. Melaksanakan penyidikan pemalsuan.
5. Mengelola hubungan yang baik dengan para auditor eksternal selaku pihak yang dapat lebih dipercaya oleh *stakeholder*, terutama dalam masalah kelayakan pertanggung jawaban manajemen.
6. Memantau dan menganalisa perkembangan terakhir mengenai kelangsungan hidup dari aktivitas bisnis dan operasional perusahaan.

Sawyer (2007) menjelaskan susunan tingkat pemeriksa dan tugas serta tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a) **Direktur Pemeriksaan Intern**
Memeriksa semua aktivitas perusahaan, catatan, kekayaan, dan personalia.
- b) **Manajer Pemeriksaan Intern**
Menyiapkan rencana pemeriksaan menyeluruh, mengidentifikasi aktivitas yang dicakup dalam pemeriksaan, menyusun struktur organisasi bagian pemeriksaan, menetapkan wilayah pemeriksaan, mengembangkan sistem pengendalian biaya.
- c) **Pengawas Pemeriksaan**
Mengawasi pekerjaan para pemeriksa, menetapkan bidang-bidang yang mengandung risiko, menetapkan program pemeriksaan yang fleksible, menyusun jadwal penugasan staf, *mereview* dan menyetujui tujuan.
- d) **Ketua Team Pemeriksaan**
Mensurvei fungsi dan aktivitas, menetapkan arah dan mendorong kegiatan pemeriksaan, menetapkan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan, menetapkan prosedur pemeriksaan, mengevaluasi keberhasilan sistem.
- e) **Pemeriksa**
Mengadakan survai atas fungsi dan aktivitas, menentukan atau membantu untuk menentukan arah pemeriksaan, merencanakan atau membantu dalam merencanakan tujuan, melakukan pemeriksaan secara profesional.
- f) **Asisten Pemeriksa**
Membantu merencanakan kegiatan, mendapatkan, menganalisa, mengevaluasi bukti-bukti sebagai dasar merumuskan pendapat yang obyektif, memeriksa transaksi-transaksi, melakukan diskusi pendahuluan mengenai kelemahan-kelemahan yang ada.

d. Kualifikasi SPI

Tunggal (2012:22) memaparkan tentang auditor intern yang baik mempunyai kualifikasi sebagai berikut:

1. **Pendidikan Dan Latihan**
Karena audit berhubungan dengan analisis dan pertimbangan, auditor intern harus mengerti catatan keuangan dan akuntansi sehingga dapat melakukan verifikasi dan analisis dengan baik.
2. **Pengalaman**
Praktik akuntansi dan auditing diperlukan bagi seorang auditor intern yang baru. Gambaran mengenai audit intern harus diberikan

secara luas dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan lingkungannya.

3. Kualitas Pribadi

Auditor intern yang kompeten harus memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

- a. Sifat Ingin Mengetahui
- b. Ketekunan
- c. Ia harus memandang suatu kesalahan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan bukan sebagai suatu kejahatan
- d. *Business Sense*/Kewirausahaan/Naluri Berdagang
- e. Dia menelaah semua pengaruh yang terjadi terhadap profitabilitas dan efisiensi kegiatan perusahaan secara luas.
- f. Kerjasama (*Cooperation*)
Dia melihat dirinya sebagai kawan-usaha, bukan sebagai saingan dengan siapa yang diperiksa. Tujuannya adalah membantu mereka dan meninjau kembali nasihat-nasihat yang diberikan dengan pihak perusahaan.
- g. Imagination/Daya Khayal
didefinisikan sebagai “perpaduan pemikiran ide-ide baru dari bagian-bagian yang dialami secara terpisah”.

Berdasarkan teori-teori yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Peran pemeriksa intern memiliki pengaruh yang besar terhadap penerapan *good governance* karena peran pemeriksa intern sangat dibutuhkan untuk mengurangi *agency theory* di suatu organisasi. Seorang auditor internal dalam menjalankan tugasnya harus memberikan penilaian yang independen, memberikan penilaian yang independen secara obyektif, meyakinkan bahwa organisasi dapat atau tidak mengatasi risiko yang dihadapi, memberikan manfaat bagi organisasi dari jasa yang diberikan sesuai kebutuhan, memberikan cara pandang yang baik dan bukan untuk menyelidiki orang, mempunyai suatu standar yang profesional, memiliki standar profesional dan kebijaksanaan secara disiplin, mampu mengendalikan risiko agar tujuan

organisasi tercapai. Oleh karena itu dengan menerapkan *good governance* dan dibentuknya suatu SPI di organisasi dapat mencegah terjadinya tindakan penyimpangan.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa Penelitian yang tersaji di bawah ini memiliki keterkaitan antara pengaruh peran Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) dalam Mewujudkan *Good Governance* pada Sekolah Tinggi di Lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan.

Tabel 2.2

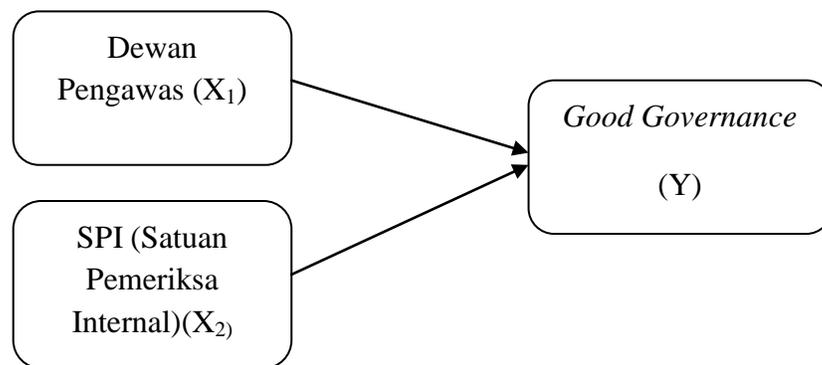
Hasil Penelitian yang Relevan

Peneliti	Judul	Hasil
Zakaria, Selvaraj, Zakaria (2006)	<i>Internal Auditors: Their Role in the Institutions of Higher Education In Malaysia</i>	Peran internal auditor terbukti berperan untuk institusi pendidikan tinggi di Malaysia
Megasari (2010)	Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Jakarta)	Komite audit dan <i>GCG</i> berkontribusi signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. DPS tidak berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja perbankan syariah.
Lahu (2011)	Pengaruh Peranan Audit Internal terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada PT.	Peranan audit internal berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Good Corporate Governance</i>

	Kimia Farma (Persero) Tbk. Jakarta	
Pramono dan Raharja (2011)	Peran Audit Internal dalam Upaya Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia	Peran internal audit berpengaruh signifikan terhadap <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada entitas berstatus Badan Layanan Umum (BLU)
Harayanto (2011)	Peran Komite Audit Dalam Mengoptimalkan Kinerja Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Pada PT Pos Indonesia (Persero)	Peran Komite Audit dan Kinerja Audit Internal berpengaruh terhadap Pelaksanaan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>
Sukirman dan Sari (2012)	Peran Internal Audit Dalam Upaya mewujudkan <i>Good University Governance</i> di UNNES	Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara peran auditor internal terhadap GUG
Sumadyo (2013)	Pengaruh Independensi Auditor dan Komite Audit Terhadap <i>Good Corporate Governance</i> (Studi Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Di Wilayah Bandung)	Independensi auditor internal dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>Good corporate governance</i> pada Bank di Bandung yang terdaftar di BEI
Puspitarini dan Anisykurillah (2013)	Peran SPI dalam pencapaian GUG pada perguruan tinggi Se-Jawa yang Berstatus BLU	Peran SPI berpengaruh positif dalam pencapaian GUG

C. Kerangka Teoritik

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel independen yaitu Dewan Pengawas (X_1), Satuan Pemeriksa Internal (*SPI*)(X_2) dan terhadap variabel dependen yaitu *Good Governance* (Y).



Gambar II.2

Sumber: Data diolah oleh penulis (2014)

Peran Dewan Pengawas (X_1) dalam rangka mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintah yang baik memiliki peran yang sangat aktif untuk mengawasi pengelolaan keuangan. Karena untuk menjadi anggota Dewan Pengawas harus memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan keuangannya serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dalam memberikan nasihat, masukan/saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja. Maka dari itu, dengan

adanya Dewan Pengawas di suatu organisasi memberikan tata kelola pemerintah yang sehat.

Peran Satuan Pemeriksa Intern (X2) memiliki pengaruh yang besar terhadap penerapan *good governance* karena peran pemeriksa intern sangat dibutuhkan untuk mengurangi *agency theory* di suatu organisasi. Seorang auditor internal dalam menjalankan tugasnya harus memberikan penilaian yang independen, memberikan penilaian yang independen secara obyektif, meyakinkan bahwa organisasi dapat atau tidak mengatasi risiko yang dihadapi, memberikan manfaat bagi organisasi dari jasa yang diberikan sesuai kebutuhan, memberikan cara pandang yang baik dan bukan untuk menyelidiki orang, mempunyai suatu standar yang profesional, memiliki standar profesional dan kebijaksanaan secara disiplin, mampu mengendalikan risiko agar tujuan organisasi tercapai. Oleh karena itu dengan menerapkan *good governance* dan dibentuknya suatu SPI di organisasi dapat mencegah terjadinya tindakan penyimpangan.

Good Governance (Y) dapat mengurangi terjadinya konflik kepentingan antara manajer dan *stakeholder* dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG: memberikan/mengungkapkan informasi secara terbuka, kinerja perusahaan dapat diukur/dipertanggungjawabkan, memiliki kesesuaian pengelolaan keuangan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan, memberikan keadilan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan. Adanya karakteristik, manfaat, dan tujuan GCG maka dapat mendorong organisasi untuk selalu berkomitmen dalam

menerapkan prinsip-prinsip GCG. Dengan demikian, tata pengelolaan pemerintah yang baik dan sehat pun akan terwujud ditambah dengan adanya peran Dewan Pengawas dan SPI.

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritik dan hasil penelitian yang relevan yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Dewan Pengawas berperan dalam mewujudkan *good governance*.

H₂: Satuan Pemeriksa Internal (SPI) berperan dalam mewujudkan *good governance*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Terkait dengan penelitian tentang peran Dewan Pengawas dan SPI dalam upaya mewujudkan *good governance* pada Sekolah Tinggi di Lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas dalam mewujudkan *Good Governance* pada Sekolah Tinggi di Lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan.
2. Untuk mengetahui peran SPI dalam mewujudkan *Good Governance* pada Sekolah Tinggi di Lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan.

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh data guna mendukung penulisan penelitian ini, penulis melakukan survei penelitian pada Sekolah Tinggi yang berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan. Lama penelitian dimulai dari bulan April s.d Juni 2014.

Objek penelitian ini untuk mengetahui peran Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksa Intern dalam Mewujudkan *Good Governance* pada Sekolah Tinggi yang berada di bawah BPSDM Kementerian Perhubungan. Responden yang

menjawab kuesioner ini adalah Ketua, Sekteratis, bagian Kasubbag Keuangan dan Anggota yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan regresi linear berganda. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengirim kuesioner melalui pos kepada alamat instansi yang dituju. Kemudian untuk mempermudah pihak instansi mengembalikan kuesioner yang dikirim, di dalam amplop telah disertakan pula amplop balasan yang telah dilengkapi dengan perangko dan alamat yang dituju.

Sumber data dalam penelitian ini adalah kuesioner yang telah diisi oleh anggota Dewan Pengawas dan SPI pada Sekolah Tinggi yang berada di bawah BPSDM Kementerian Perhubungan.

D. Populasi dan Sampling

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksa Internal (auditor internal) pada Sekolah Tinggi yang berada di bawah BPSDM Kementerian Perhubungan.

Sampel dari penelitian ini sama dengan populasi, di setiap anggota SPI ada yang terdiri dari 8-10 orang dan anggota Dewan Pengawas terdiri dari 3-5 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data ini menggunakan data primer, yang diperoleh dengan cara mengirim kuesioner melalui pos kepada alamat sekolah tinggi yang dituju, di dalam amplop telah disertakan pula amplop balasan yang telah dilengkapi dengan perangko dan alamat yang dituju berada di Jl. Danau Sunter Utara Blok G Jakarta Utara, Jl. Marunda Makmur Cilincing, Jakarta Utara, Jl. Singosari No 2A Semarang, Jl. Jemur Andayani I/73, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, Jl. Tentara Pelajar 173, Makasar.

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner diukur menggunakan skala likert 5 sampai dengan 1 untuk mendapatkan rentang jawaban sangat setuju sampai dengan jawaban sangat tidak setuju. Untuk mempermudah melihat frekuensi jawab dari responden atas masing-masing variabel yang ada di dalam kuesioner, maka setiap indikator diklasifikasikan dan diberi skor sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran

Jawaban	Skor
SS = Sangat Setuju	5
S = Setuju	4
RG = Ragu-ragu	3
TS = Tidak Setuju	2
STS = Sangat Tidak Setuju	1

Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan berbagai informasi terkait penelitian ini dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel, dan lain-lain.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Good Governance*.

a. Definisi Konseptual

GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi terciptanya tujuan perusahaan (Zarkasyi, 2008:36). Suatu organisasi yang menerapkan *good governance* dapat mengurangi terjadinya konflik kepentingan antara manajer dan *stakeholder*.

b. Definisi Operasional

Prinsip-prinsip GCG menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN pasal 3, meliputi:

1. Transparansi (*Transparency*)

Memberikan/mengungkapkan informasi secara terbuka.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kinerja perusahaan dapat diukur/dipertanggungjawabkan.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Memiliki kesesuaian pengelolaan keuangan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kemandirian (*Independency*)

Perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Memberikan keadilan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan.

2. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peran Dewan Pengawas (X1) dan Satuan Pemeriksa Intern sebagai (X2).

a. Dewan Pengawas

1. Definisi Konseptual

Pengawasan atau pengendalian didefinisikan sebagai suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan balik informasi; untuk membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan itu; menentukan apakah ada penyimpangan tersebut; dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa

semua sumber daya organisasi telah digunakan dengan cara paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan organisasi (Suhendi 2010). Maka dari itu, dengan adanya Dewan Pengawas di suatu organisasi memberikan tata kelola pemerintah yang sehat.

2. Definisi Operasional

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum menjelaskan syarat keanggotaan Dewan Pengawas:

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang:
 - a. Memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLU, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum

2.2 Satuan Pemeriksa Internal

1. Definisi Konseptual

Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi. Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang

akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanannya pada manajemen (Hery 2013:234). Peran pemeriksa intern memiliki pengaruh yang besar terhadap penerapan *good governance* karena sangat dibutuhkan untuk mengurangi *agency theory* di suatu organisasi.

2. Definisi Operasional

Definisi audit internal yang dijelaskan oleh Tunggal (2012:271) terdapat beberapa kata kunci dari definisi tersebut diantaranya:

1. *Independent*

Memberikan penilaian yang independen secara obyektif.

2. *Assurance and consulting*

Memberikan keyakinan bahwa perusahaan dapat atau tidak mengelola risiko dengan baik.

3. *Designed to add value*

Auditor internal harus dapat memberikan manfaat pada perusahaan

4. *Improve an organization's operations*

Auditor internal memberikan cara pandang yang baik dan bukan untuk menyerlidiki orang.

5. *Systematic, disciplined approached*

Mempunyai suatu standar yang profesional

6. *Risk management, control and governance process*

Mampu mengendalikan risiko agar tujuan organisasi tercapai.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Sumber	Indikator	Butir Pernyataan	Sumber Indikator
<i>Good Governance</i>	Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011	1) Transparansi 2) Akuntabilitas 3) Pertanggungjawaban 4) Kemandirian 5) Kewajaran	1-4 5-9 10-12 13-15 16-18	Jurnal Sumadyo (2013)
Dewan Pengawas	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007	1) Integritas 2) Dedikasi 3) Memahami masalah-masalah BLU 4) Meluangkan waktu untuk melaksanakan tugas 5) Mampu melaksanakan perbuatan hukum	1-3 4-5 6-8 9-12 13-14	Jurnal Megasari (2010)
Satuan Pemeriksa Intern	Tunggal (2012:271)	1) Independen 2) Keyakinan perusahaan dapat atau tidak mengelola risiko 3) Memberikan manfaat 4) Cara pandang yang baik dan bukan menyelidiki orang 5) Standar profesional 6) Mengendalikan risiko	1-3 4-7 8-9 10-12 13-15 16-18	Jurnal Sari dan Raharja (2011)

Sumber: Data Diolah Penulis (2014)

F. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghazali, 2011:19).

2. Pengujian Kualitas Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS 19.0.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghazali 2011:52).

Uji validitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) di Makasar yang juga menggunakan pengelolaan Badan Layanan Umum.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghazali 2011:47).

SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70 (Nunnally 1994 dalam Ghazali 2011:48).

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa langkah pengujian, yaitu sebagai berikut:

a. Uji Asumsi Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011 : 160). Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal *P-P Plots*.

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal , maka data berdistribusi normal.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka data tidak berdistribusi normal.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan karena secara visual data yang tidak normal dapat terlihat normal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini uji normalitas dilengkapi dengan uji statistik menggunakan Uji

Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau 5%, maka data dinyatakan berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5%, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

b. Uji Asumsi Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011:105). Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai toleransi dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai *cut off* yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya multikolonieritas adalah *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

- 1) Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai $VIF < 10$ artinya mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.
- 2) Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau nilai $VIF > 10$ artinya mengindikasikan terjadi multikolonieritas.

c. Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi, dapat dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized*.

- 1) Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

Analisis dengan grafik *Scatterplots* memiliki kelemahan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan uji statistik untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah Uji Glejser. Model regresi dinyatakan tidak mengandung heteroskedastisitas jika signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%.

- 1) Jika signifikansi $> 0,05$ atau 5%, maka mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

- 2) Jika signifikansi $< 0,05$ atau 5%, maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah regresi dimana variabel terikatnya (Y) dihubungkan/dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga, dan seterusnya variabel bebas ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linier (Hasan, 2010:254).

Analisis ini digunakan dengan melibatkan variabel dependen (Y) dan variable independen (X_1 dan X_2). Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana:

Y = variabel dependen (*good governance*)

a = bilangan berkonstanta

b_1, b_2 = koefisien arah garis

X_1 = variabel independen (Dewan Pengawas)

X_2 = variabel independen (Satuan Pemeriksa Internal)

5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, artinya keputusan bias benar atau salah, sehingga menimbulkan risiko. Besar kecilnya risiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas (Hasan, 2010:140).

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crosssection) relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghazali, 2011:97).

b. Uji Pengaruh Parsial (Uji Statistik t)

Menurut Ghazali (2011:98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, atau :

$H_0 : \beta_i = 0$, artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau :

$H_A : \beta_i \neq 0$, artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan untuk menguji Uji-t adalah apabila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan 5%, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i=0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

c. Uji Pengaruh Simultan (Uji f)

Uji-F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan (simultan) terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011:98). Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan untuk menguji uji

statistik F adalah jika nilai $F > 4$ maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan $< 0,05$ atau 5%. Dengan kata lain, hipotesis alternatif atau H_a diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Unit Analisis

1. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel ini memiliki peran yang baik pada Sekolah Tinggi di lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya. Aspek yang diteliti meliputi variabel Dewan Pengawas (X_1), Satuan Pemeriksa Internal (SPI) (X_2), dan *Good Governance* (Y). Data diperoleh dari hasil kuesioner yang merupakan data primer dengan 61 (enam puluh satu) orang sebagai responden dari 5 Sekolah Tinggi yang berada di Lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan.

Untuk mengetahui berapa banyak responden yang ikut serta dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Responden

No.	Nama Sekolah Tinggi	Jumlah	Probabilitas
1	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) (Jakarta)	13	21,3
2	Politeknik Ilmu Pelayaran (Semarang)	13	21,3
3	Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) (Jakarta)	10	16,4
4	Politeknik Transportasi Keselamatan Jalan (PTKJ) (Tegal)	12	19,7
5	Akademi Transportasi Keselamatan Penerbangan (ATKP) (Surabaya)	13	21,3
	Total	61	100

Sumber: Data primer yang diolah 2014

Responden dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta sebanyak 13 orang responden (21,3%), dari 13 orang responden STIP terdapat 9 orang responden laki-laki dan 4 orang responden perempuan. Responden Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang sebanyak 13 orang responden (21,3%) dan 7 merupakan responden laki-laki dan 6 merupakan perempuan. Responden Balai Besar Pendidikan Peningkatan dan Penyegaran Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta sebanyak 10 orang responden (16,4%), 7 orang responden laki-laki dan 3 orang responden perempuan. Responden Politeknik Transportasi Keselamatan Jalan (PTKJ) Tegal sebanyak 12 orang responden (19,7%), dari 8 responden laki-laki dan 4 orang responden

perempuan. Responden Akademi Transportasi Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya sebanyak 13 orang responden (21,3%) 10 orang merupakan responden laki-laki dan 3 orang merupakan responden perempuan.

Dikarenakan peneliti hanya memiliki waktu selama satu bulan untuk menyebarkan kuesioner dan para dewan pengawas hanya sebulan sekali berada di kantor serta anggota SPI juga memiliki kesibukan masing-masing dengan tugasnya maka tidak semua kuesioner dapat dikembalikan. Dibawah ini adalah rincian pengiriman dan pengembalian kuesioner yang dapat dilihat pada tabel 4.2:

Tabel 4.2
Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Kuesioner	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	65	100%
Kuesioner	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang tidak kembali	4	6,16%
Kuesioner yang kembali	61	93,84%
Kuesioner yang digugurkan	0	0%
Kuesioner yang digunakan	61	93,84%
<i>Respon rate</i>	$65/65 \times 100\% =$	100%
<i>Usable respon rate</i>	$61/65 \times 100\% =$	93,84%

Sumber: Data primer yang diolah 2014

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebar ke responden sebanyak 65 kuesioner dan yang terkumpul sebanyak 61. Tidak terdapat kuesioner yang digugurkan, sehingga secara keseluruhan jumlah kuesioner yang layak digunakan untuk dianalisis sebanyak 61 kuesioner. Responden yang tidak mengembalikan kuesioner dikarenakan adanya anggota SPI yang sedang bertugas di luar kota dan anggota dewan pengawas yang tidak hadir.

2. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para dewan pengawas dan anggota SPI pada Sekolah Tinggi yang berada di lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan. Karakteristik responden penelitian meliputi jenis kelamin, usia, dan lama pengalaman kerja. Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 4.3, Tabel 4.4, Tabel 4.5.

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Laki-Laki	51	84%
Perempuan	10	16%
Total	61	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2014

Tabel 4.3 menunjukkan jumlah laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin. Pada tabel 4.3 dapat diketahui jumlah responden laki-laki sebanyak 51 orang (84%) dan perempuan sebanyak 10 orang (16%), sehingga sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
21-25	7	11%
26-30	2	3%
31-35	12	20%
36-40	9	15%
41-45	6	10%
>45	25	41%
Total Responden	61	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2014

Tabel 4.4 berfungsi untuk mengetahui usia responden saat ini. Pada tabel 4.4 responden yang berusia 21-25 tahun sebanyak 7 orang (11%), 26-30 tahun sebanyak 2 orang atau (3%), 31-35 tahun sebanyak 12 orang (20%), 36-40 tahun sebanyak 9 orang (15%), 41-45 tahun sebanyak 6 orang (10%) dan > 45 tahun ke atas sebanyak 25 orang (41%). Dengan demikian, sebagian besar responden berusia > 45 tahun.

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Pengalaman Kerja

Lama Pengalaman Kerja	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
0-4 tahun	19	31%
5-9 tahun	12	20%
10-14 tahun	12	20%
> 15 tahun	18	30%
Total	61	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2014

Tabel 4.5 berfungsi untuk mengetahui berapa lama pengalaman kerja yang dimiliki oleh dewan pengawas dan satuan pemeriksa internal. Dalam penelitian ini, jumlah responden yang lama pengalaman kerja 0-5 tahun sebanyak 19 orang (31%), 5-9 tahun sebanyak 12 orang (20%), 10-14 tahun sebanyak 12 orang (20%) dan > 15 tahun sebanyak 18 orang (30%). Dengan demikian, sebagian besar responden memiliki lama pengalaman kerja 0-4 tahun.

B. Hasil Penelitian

1. Pengujian Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghazali 2011:52).

Jumlah responden yang menjadi subyek penelitian berkaitan dengan partisipasinya dalam penelitian ini adalah Sekolah Tinggi di kota Makasar yang berada di Lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan berjumlah 15 orang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel ini memiliki peran yang baik pada Sekolah Tinggi di lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya.

Aspek yang diteliti meliputi variabel Dewan Pengawas (X_1), Satuan Pemeriksa Internal (SPI) (X_2), dan *Good Governance* (Y). Data diperoleh dari hasil kuesioner yang merupakan data primer dengan 15 (lima belas) orang sebagai responden dari Sekolah Tinggi di kota Semarang yang berada di Lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan.

Tabel 4.6

Daftar Sekolah Tinggi Objek Penelitian dalam Pengujian Validitas

Nama Sekolah Tinggi	Jumlah Responden
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makasar	15
Total Responden	15

Sumber: Data primer yang diolah 2014

Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item pernyataan dengan skor total individu. Uji validitas dilakukan dengan menguji 15 jawaban responden. Jumlah item pernyataan yang diuji validitasnya sebanyak 50 item, terdiri dari pernyataan variabel Dewan Pengawas sebanyak 14 item, pernyataan variabel Satuan Pemeriksa Internal (SPI) sebanyak 18 item, dan pernyataan variabel *Good Governance* sebanyak 18 item.

Dengan menggunakan uji dua sisi (*two-tailed*) dengan taraf signifikansi 5% maka nilai r tabel dalam penelitian ini adalah 0.482. Item pernyataan dinyatakan valid jika nilai r hitung > dari r tabel atau lebih besar dari 0,05.

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Pernyataan	Nilai Korelasi (<i>Pearson Correlation</i>)	Keterangan
Dewan Pengawas	X _{1.1}	0,846	Valid
	X _{1.2}	0,759	Valid
	X _{1.3}	0,749	Valid
	X _{1.4}	0,754	Valid
	X _{1.5}	0,855	Valid
	X _{1.6}	0,644	Valid

	X _{1.7}	0,603	Valid
	X _{1.8}	0,674	Valid
	X _{1.9}	0,761	Valid
	X _{1.10}	0,206	Tidak Valid
	X _{1.11}	0,763	Valid
	X _{1.12}	0,727	Valid
	X _{1.13}	0,237	Tidak Valid
	X _{1.14}	0,665	Valid
Satuan Pemeriksa Internal (SPI)	X _{2.15}	0,551	Valid
	X _{2.16}	0,797	Valid
	X _{2.17}	0,411	Tidak Valid
	X _{2.18}	0,828	Valid
	X _{2.19}	0,833	Valid
	X _{2.20}	0,832	Valid
	X _{2.21}	0,833	Valid
	X _{2.22}	0,629	Valid
	X _{2.23}	0,828	Valid
	X _{2.24}	0,242	Tidak Valid
	X _{2.25}	0,192	Tidak Valid
	X _{2.26}	0,608	Valid
	X _{2.27}	0,644	Valid
X _{2.28}	0,797	Valid	

	X _{2.29}	0,920	Valid
	X _{2.30}	0,592	Valid
	X _{2.31}	0,599	Valid
	X _{2.32}	0,628	Valid
<i>Good Governance</i>	Y _{.33}	0,915	Valid
	Y _{.34}	0,744	Valid
	Y _{.35}	0,252	Tidak Valid
	Y _{.36}	0,915	Valid
	Y _{.37}	0,593	Valid
	Y _{.38}	0,575	Valid
	Y _{.39}	0,329	Tidak Valid
	Y _{.40}	0,697	Valid
	Y _{.41}	0,915	Valid
	Y _{.42}	0,603	Valid
	Y _{.43}	0,794	Valid
	Y _{.44}	0,647	Valid
	Y _{.45}	0,752	Valid
	Y _{.46}	0,915	Valid
	Y _{.47}	0,603	Valid
	Y _{.48}	0,898	Valid
	Y _{.49}	0,593	Valid
Y _{.50}	0,753	Valid	

Sumber: Data primer yang diolah, 2014

Dari tabel 4.7 terlihat variabel dewan pengawas memiliki *pearson correlation* dari 0,603 – 0,855 ($> 0,482$), hal ini berarti bahwa pernyataan dalam kuesioner adalah valid. Variabel satuan pemeriksa internal (SPI) memiliki *pearson correlation* dari 0,551 – 0,833 ($> 0,482$), hal ini berarti bahwa pernyataan tersebut juga valid. Variabel *good governance* memiliki *pearson correlation* dari 0,575 – 0,915 ($> 0,482$) hal ini berarti bahwa pernyataan tersebut valid.

Dari hasil uji validitas terhadap pernyataan variabel dewan pengawas diketahui dari 14 pernyataan ada 12 pernyataan yang valid dan 2 pernyataan yang tidak valid. Dari 14 pernyataan diketahui bahwa pernyataan 10,13 memiliki r hitung lebih rendah r tabel dengan nilai 0.206 dan 0.237.

Selanjutnya Dari hasil uji validitas terhadap pernyataan variabel SPI diketahui dari 18 pernyataan ada 15 pernyataan yang valid dan 3 pernyataan yang tidak valid. Dari 18 pernyataan tersebut terlihat bahwa pernyataan 17,24,25 memiliki r hitung lebih rendah r tabel dengan nilai 0.411, 0.242, dan 0.192.

Dari hasil uji validitas terhadap pernyataan variabel *Good Governance* dari 18 pernyataan ada 16 pernyataan yang valid dan 2 pernyataan yang tidak valid. Dari 18 pernyataan itu terlihat bahwa pernyataan 35 dan 39 memiliki r hitung lebih rendah r tabel dengan nilai 0.252 dan 0.32.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dari suatu variabel. Butir pernyataan dalam variabel dikatakan reliabel apabila jawaban responden adalah konsisten. Item pernyataan yang dinyatakan reliabel adalah yang memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0.70 (Nunnally, 1994, dalam Ghozali, 2011:48). Jika variabel memberikan nilai tersebut maka dapat menghasilkan data yang dapat dipercaya.

Tabel 4.8

Hasil Perhitungan Uji Reabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach Alpha	>/<	Tetapan	Keterangan
Dewan pengawas	0.922	>	0.70	Reliabel
SPI	0.937	>	0.70	Reliabel
<i>Good Governance</i>	0.945	>	0.70	Reliabel

Sumber : Data diolah oleh penulis (2014)

Berdasarkan Tabel 4.8, menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* yang melebihi 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pernyataan yang mewakili variabel-variabel uji adalah reliabel. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk memastikan bahwa instrumen memiliki konsistensi dan kehandalan sebagai alat ukur bagi masing-masing variabel. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dari suatu variabel. Butir pernyataan dalam variabel dikatakan reliabel apabila jawaban responden adalah

konsisten. Item pernyataan yang dinyatakan reliabel adalah yang memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0.70 (Nunnally, 1994, dalam Ghozali, 2011:48). Jika variabel memberikan nilai tersebut maka dapat menghasilkan data yang dapat dipercaya.

2. Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakter sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Dewan Pengawas, Satuan Pemeriksa Internal (SPI), dan *Good Governance*. Analisis penelitian berdasarkan pada hasil jawaban responden atas 43 item pernyataan.

Berikut merupakan statistik deskriptif Berikut merupakan statistik deskriptif nilai minimum (*min*), nilai maksimum (*max*), nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi disajikan dalam tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.9
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
dewas	61	46,00	59,00	52,2951	3,24728
sipi	61	54,00	74,00	63,4262	4,73448
gg	61	63,00	80,00	70,6885	4,96501
Valid N (listwise)	61				

Sumber: Data diolah oleh penulis (2014)

Tabel 4.9 di atas menunjukkan hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap seluruh variabel independen dan variabel dependen dari 61 sampel yang diolah dengan tiga variabel yaitu Dewan Pengawas, Satuan Pemeriksa Internal (SPI) dan *Good Governance*. Dalam penelitian ini masing-masing memiliki nilai rata-rata 52,29 ; 63,42 ; dan 70,68. Seluruh variabel diukur menggunakan skala *likert*. Adapun penjelasan dari pengukuran statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

- a. Variabel Dewan Pengawas dengan menggunakan 14 item pernyataan dalam kuesioner mempunyai kisaran 46 sampai 59 dengan nilai rata-rata sebesar 52,29 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 3,247 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang dewan pengawas. Dengan nilai rata-rata sebesar 52,29 dapat dikatakan

- bahwa dewan pengawas memiliki peran penting dalam mewujudkan *good governance*.
- b. Variabel Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) menggunakan 18 item pernyataan dalam kuesioner mempunyai kisaran 54 sampai 74, dengan nilai rata-rata sebesar 63,42 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 4,734 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang dewan pengawas. Dengan nilai rata-rata sebesar 63,42 mengindikasikan bahwa peran Satuan Pemeriksa Internal (SPI) juga memiliki pengaruh penting dalam mewujudkan *good governance*.
- c. Variabel *good governance* menggunakan 18 item pernyataan dalam kuesioner mempunyai kisaran jawaban berkisar antara 63 sampai dengan 80, dengan nilai rata-rata sebesar 70,68 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 4,965 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang *good governance*. Dengan nilai rata-rata sebesar 70,68 mengindikasikan bahwa dengan adanya penerapan *good governance* maka organisasi akan memiliki tata kelola yang baik diantaranya sikap transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Menentukan normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan > 0.05 maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan jika nilai signifikan < 0.05 maka dapat dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal.

Dari hasil uji normalitas data menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S), dapat dilihat bahwa nilai pada Asymp. Sig. (2 tailed) adalah 0,994 yang mana jauh diatas 0,05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 4.10

Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		61
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,52043261
Most Extreme Differences	Absolute	,054
	Positive	,048
	Negative	-,054
Kolmogorov-Smirnov Z		,424
Asymp. Sig. (2-tailed)		,994

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Data primer yang diolah 2014

Untuk memperjelas sebaran data dalam penelitian ini maka disajikan pula dalam grafik normal *P-Plot* dimana dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2011) yaitu, data variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik searah mengikuti garis diagonal.

Pada grafik normal *P-Plot* (lampiran 7) dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal. Grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada tidaknya korelasi yang sangat kuat diantara variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas terjadi jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) melebihi 10. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi adalah sebagai berikut:

Multikolenearitas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas-variabel independen yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolenearitas yang tinggi.

Dasar pengambilan keputusan yaitu :

Jika $VIF > 10$ maka H_a diterima (ada multikolinearitas)

Jika $VIF < 10$ maka H_a ditolak (Tidak ada multikolinearitas).

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini:

Tabel 4.11
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	26,067	13,184		1,977	,053		
	dewas	,419	,184	,274	2,278	,026	,988	1,012
	spi	,358	,126	,342	2,839	,006	,988	1,012

a. Dependent Variable: gg

Sumber: Data diolah oleh penulis (2014)

Berdasarkan tabel hasil multikolinearitas di atas, variabel (dewan pengawas), (satuan pemeriksa internal) mempunyai nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu ke pengamatan yang lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Uji regresi yang baik apabila tidak terdapat heteroskedastisitas (variens yang berbeda). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat plot residual terhadap struktur modal Y yang ditaksir dari garis regresi.

Dari grafik scatterplots (lampiran 8) terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan titik-titik ini terlihat tidak membentuk pola. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

Untuk lebih memastikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini dilakukan uji glejser. Hasil uji glejser sebagai berikut:

Tabel 4.12

Hasil Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-6,680	7,285		-,917	,363
dewas	,071	,102	,090	,697	,489
spi	,105	,070	,195	1,510	,136

a. Dependent Variable: AbsUi

Sumber: Data diolah oleh penulis (2014)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) berada diatas tingkat kepercayaan 5% atau 0.05 yang berarti tidak ada yang signifikan. Dalam uji glejser, jika variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel

dependen berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Regresi Berganda

Untuk menganalisis pengaruh dewan pengawas (X_1), satuan pemeriksa internal (X_2) terhadap *good governance* (Y), maka penulis menggunakan teknik analisis regresi dengan bantuan program komputer SPSS versi 19.0. Hasil pengolahan data analisis regresi tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.13
Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	26,067	13,184		1,977	,053		
	dewas	,419	,184	,274	2,278	,026	,988	1,012
	spi	,358	,126	,342	2,839	,006	,988	1,012

a. Dependent Variable: gg

Sumber: Data diolah oleh penulis (2014)

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, maka dapat diperoleh suatu persamaan garis regresi sebagai berikut :

$$\hat{Y} = 26,067 + 0,419X_1 + 0,358X_2$$

- 1) Konstanta a sebesar 28,221 menyatakan bahwa jika dewan pengawas (X_1), satuan pengawas internal (X_2) dianggap konstan, maka *good governance* (Y) adalah 26,067.
- 2) Koefisien regresi b_1 sebesar 0,419 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena bertanda positif) satu satuan variabel X_1 (dewan pengawas) akan meningkatkan variabel Y (*good governance*) sebesar 0,419 dengan asumsi variabel satuan pemeriksa internal (X_2) konstan.
- 3) Koefisien regresi b_2 sebesar 0,358 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena bertanda positif) satu satuan variabel X_2 (satuan pemeriksa internal) akan meningkatkan variabel Y (satuan pemeriksa internal) sebesar 0,358 dengan asumsi variabel dewan pengawas (X_1).

5. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.14

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,414 ^a	,171	,142	4,59771

a. Predictors: (Constant), spi, dewas

b. Dependent Variable: gg

Sumber: Data diolah oleh penulis (2014)

Hasil analisis koefisien determinasi yang disajikan pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa *Adjusted R Square* = 14,2%, yang berarti variabel dewan pengawas dan satuan pemeriksa internal berpengaruh terhadap *good governance*. Kedua variabel independen tersebut mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen sebesar 14,2% sedangkan sisanya yaitu sebesar 85,8% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini, seperti Direktur, Dewan Penyantun, Koordinator Manajemen Mutu.

b. Uji Parsial (uji-t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dari variabel yang dimasukkan ke dalam model (variabel dewan pengawas dan satuan pemeriksa internal) dan membandingkan nilai signifikansi dengan taraf signifikansi 0.05, kedua variabel tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap *good governance*.

Nilai t-tabel untuk n 61 yaitu sebesar 2,000. hasil dari uji t dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.15

Uji Parsial (Uji-t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	26,067	13,184		1,977	,053		
dewas	,419	,184	,274	2,278	,026	,988	1,012
spi	,358	,126	,342	2,839	,006	,988	1,012

a. Dependent Variable: gg

Sumber: Data diolah oleh penulis (2014)

1) Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa dewan pengawas berpengaruh terhadap *good governance*. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh *nilai sig* variabel X_1 sebesar 0,026 dan nilai t_{hitung} (2.278) > t_{tabel} (2.000). Dalam penelitian ini digunakan taraf nyata (α) sebesar 5%, sehingga nilai $sig < \alpha$ (0,026 < 0,05). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti secara parsial terdapat pengaruh positif yang signifikan antara dewan pengawas (X_1) terhadap *good governance* (Y), artinya jika dewan pengawas bisa dijalankan dengan baik maka *good governance* akan meningkat.

2) Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa satuan pemeriksa internal berpengaruh secara signifikan terhadap *good governance*.

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh *nilai sig* variabel X_2 sebesar 0,006 dan nilai t_{hitung} (2.839) > t_{tabel} (2.000). Dalam penelitian ini digunakan taraf nyata (α) sebesar 5%, sehingga nilai $sig < \alpha$ (0,006 < 0,05). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti secara parsial terdapat pengaruh positif yang signifikan antara satuan pemeriksa internal (X_2) terhadap *good governance* (Y), artinya jika satuan pemeriksa internal bisa dijalankan dengan baik maka *good governance* akan meningkat.

c. Uji Simultan (Uji-f)

Hasil uji F dapat dilihat pada output ANOVA dari hasil analisis regresi linier berganda. Dengan menggunakan sampel sebanyak 61 dan tingkat keyakinan 95%.

Untuk menentukan apakah hipotesis alternatif mengenai pengaruh simultan kedua variabel independen terhadap satu variabel dependen dalam penelitian ini dapat dilakukan perbandingan antara F hitung dengan F tabel.

Tabel 4.16**Hasil Uji f****ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	253,023	2	126,512	5,985	,004 ^a
	Residual	1226,059	58	21,139		
	Total	1479,082	60			

a. Predictors: (Constant), spi, dewan

b. Dependent Variable: gg

Sumber: Data diolah oleh penulis (2014)

Setelah melakukan pengujian hipotesis sesuai dengan langkah-langkah pengujian yang telah disebutkan dalam bab III, dan berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh signifikan F sebesar 0,004. Dalam penelitian ini digunakan taraf nyata (α) sebesar 5%, sehingga nilai signifikan $F < \alpha$ ($0,004 < 0,05$). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti secara bersama-sama terdapat pengaruh positif yang signifikan dewan pengawas (X_1), satuan pemeriksa internal (X_2), terhadap *good governance* (Y).

C. Pembahasan

Hasil yang didapat dari penelitian ini dengan melibatkan 61 orang Dewan pengawas dan SPI yang bekerja pada Sekolah Tinggi di Lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan sebagai responden adalah a) Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) berpengaruh dalam mewujudkan *good governance* secara parsial, b) Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh dalam mewujudkan *good governance*.

Dalam penelitian ini, mencakup tiga variabel, variabel pertama Dewan Pengawas, variabel kedua yaitu Satuan Pemeriksa Internal (SPI). Variabel ketiga yaitu *good governance*. Variabel pertama Dewan Pengawas yang terdiri dari indikator integritas, dedikasi, dapat memahami masalah, meluangkan waktu untuk melaksanakan tugas, dan mampu melaksanakan perbuatan hukum. Variabel kedua yaitu Satuan Pemeriksa Internal (SPI) terdiri dari indikator independen, keyakinan, memberikan manfaat, cara pandang, standar profesional, dan mampu mengendalikan risiko. Variabel ketiga yaitu *good governance* yang terdiri dari indikator transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran.

Pembahasan untuk masing-masing hasil uji hipotesis akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Dewan Pengawas terhadap *Good Governance*

Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan dalam tabel 4.15 menggunakan perhitungan SPSS diperoleh *nilai sig* variabel X_1 sebesar 0,026 dan nilai t_{hitung} (2.278) > t_{tabel} (2.000). Dalam penelitian ini digunakan taraf nyata (α) sebesar

5%, sehingga nilai $sig < \alpha$ ($0,026 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti secara parsial terdapat pengaruh positif yang signifikan antara dewan pengawas (X_1) terhadap *good governance* (Y), artinya jika dewan pengawas bisa dijalankan dengan baik maka *good governance* akan meningkat.

Pada hasil uji regresi berganda yang disajikan dalam tabel 4.13 menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif pada variabel dewan pengawas terhadap *good governance* artinya peran dewan pengawas berkontribusi dalam mewujudkan *good governance* sehingga dewan pengawas memiliki pengaruh dalam mewujudkan *good governance* pada sekolah tinggi. Hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian Megasari (2010) yang membuktikan bahwa dewan pengawas tidak berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan *good governance*.

Menurut Hermawan (2009) yang menyatakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertindak sebagai wakil dari pemilik perusahaan yang mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Peran monitoring yang efektif dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat mencegah manajemen menyajikan laporan keuangan yang berkualitas rendah. Dengan demikian diharapkan keefektifan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat melakukan peran monitoring yang lebih baik sehingga manajemen atau *agent* akan bertindak lebih hati-hati dan lebih transparan sesuai dengan prinsip *good corporate governance*

dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan/organisasi sehingga tindakan ekspropriasi yang dilakukan oleh manajemen atas *principal* yang dilakukan melalui laporan keuangan dapat dihindari.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran dewan pengawas terhadap *good governance* secara parsial tersebut juga tercermin pada butir pernyataan nomor 9 mengenai seorang dewan pengawas harus rela berkorban untuk memberikan waktu demi keberhasilan organisasi, karena dalam butir pernyataan tersebut memiliki total skor yang tinggi. Maka hal ini menjelaskan bahwa responden setuju betapa pentingnya waktu seorang dewan pengawas supaya berada di dalam organisasi demi keberhasilan organisasi dalam mewujudkan *good governance*. Hal tersebut adalah cara seorang dewan pengawas untuk dapat memberikan sebagian waktunya paling tidak sebulan sekali datang menghadiri rapat untuk mengetahui isi dari laporan keuangan sehingga dewan pengawas dapat mencegah manajemen dalam menyajikan laporan keuangan yang rendah serta dapat memonitor manajemen agar bertindak lebih hati-hati dan lebih transparansi dalam menjalankan aktivitas bisnis organisasi.

Sedangkan pada butir pernyataan nomor 7, mengenai dewan pengawas harus bisa mengatasi resiko yang terjadi di organisasi, dalam butir pernyataan ini mendapatkan skor yang paling rendah. Maka dapat dijelaskan bahwa dewan pengawas dalam organisasi ini belum sepenuhnya mampu mengatasi resiko yang

terjadi apabila tidak dibantu oleh organ-organ yang mendukung dewan pengawas seperti komite audit, direktur dan juga auditor internal di organisasi.

2. Pengaruh Satuan Pemeriksa Internal terhadap *Good Governance*

Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan dalam tabel 4.15 menggunakan perhitungan SPSS diperoleh *nilai sig* variabel X_2 sebesar 0,006 dan nilai t_{hitung} (2.839) > t_{tabel} (2.000). Dalam penelitian ini digunakan taraf nyata (α) sebesar 5%, sehingga nilai *sig* < α (0,006 < 0,05). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti secara parsial terdapat pengaruh positif yang signifikan antara satuan pemeriksa internal (X_2) terhadap *good governance* (Y), artinya jika satuan pemeriksa internal bisa dijalankan dengan baik maka *good governance* akan meningkat.

Hasil pada uji regresi berganda yang disajikan dalam tabel 4.13 menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif pada variabel satuan pemeriksa internal terhadap *good governance* artinya peran satuan pemeriksa internal memiliki kontribusi dalam mewujudkan *good governance* sehingga satuan pemeriksa internal memiliki pengaruh dalam mewujudkan *good governance* pada sekolah tinggi. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Puspitarini dan Anisykurillah (2013) yang membuktikan bahwa peran SPI berpengaruh dalam mewujudkan *good governance*.

Hal ini sesuai dengan pernyataan menurut Hery (2013:229) beberapa tugas satuan pemeriksa internal lainnya yang sejalan dengan manfaat yang akan diperoleh dari diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yaitu auditor internal berkewajiban membantu manajemen dalam mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan.

Dalam hal ini, perlu bagi auditor internal untuk memastikan bahwa dalam kegiatan operasional organisasi tidak terjadi pemborosan (inefisiensi) yang tidak perlu, auditor internal berkewajiban untuk memastikan adanya pengamanan yang memadai atas keberadaan seluruh aktiva yang dimiliki organisasi, auditor internal juga harus dapat mengambil tindakan *preventive* (pencegahan) atas kemungkinan terjadinya penyimpangan, kasus penipuan (korupsi) yang dilakukan karyawan maupun manajemen dalam perusahaan, melaksanakan penyidikan pemalsuan, mengelola hubungan yang baik dengan para auditor eksternal selaku pihak yang dapat lebih dipercaya oleh *stakeholder*, terutama dalam masalah kelayakan pertanggung jawaban manajemen, memantau dan menganalisa perkembangan terakhir mengenai kelangsungan hidup dari aktivitas bisnis dan operasional perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran satuan pemeriksa internal terhadap *good governance* secara parsial tersebut juga tercermin pada butir pernyataan nomor 12 mengenai seorang satuan pemeriksa internal dengan adanya SPI kegiatan yang dilakukan organisasi dapat diawasi dengan lebih baik, karena

dalam butir pernyataan tersebut memiliki total skor yang tinggi. Maka hal ini menjelaskan bahwa responden setuju betapa pentingnya keberadaan pemeriksa internal (auditor internal) dalam organisasi untuk membantu manajemen dalam memeriksa/mengaudit laporan keuangan organisasi berkaitan dengan kegiatan keuangan maupun kegiatan operasional organisasi dalam mewujudkan *good governance*. Hal tersebut adalah cara satuan pemeriksa internal untuk memastikan bahwa dalam kegiatan operasional organisasi tidak terjadi pemborosan, memastikan adanya pengamanan yang memadai atas keberadaan seluruh aktiva yang dimiliki organisasi, dapat mengambil tindakan pencegahan penyimpangan, terjadinya penipuan yang dilakukan oleh karyawan maupun manajemen organisasi.

Sedangkan pada butir pernyataan nomor 1 mengenai anggota SPI harus memberikan penilaian yang independen, dalam butir pernyataan ini mendapatkan skor yang paling rendah. Maka dapat dijelaskan bahwa Satuan Pemeriksa Internal (SPI) belum sepenuhnya memberikan penilaian yang independen untuk mengelola organisasi tersebut dengan baik.

3. Pengaruh Dewan Pengawas dan SPI terhadap *Good Governance*

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh signifikan F sebesar 0,004. Dalam penelitian ini digunakan taraf nyata (α) sebesar 5%, sehingga nilai significance $F < \alpha$ ($0,004 < 0,05$). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti secara simultan terdapat pengaruh positif yang

signifikan dewan pengawas (X_1), satuan pemeriksa internal (X_2), terhadap *good governance* (Y).

Peran dewan pengawas dan pemeriksa internal dalam mewujudkan *good governance* memiliki keterkaitan dalam menjalankan tugasnya demi kelangsungan aktivitas organisasi. Dalam hal ini seorang dewan pengawas mempunyai kegiatan lain di luar organisasi sehingga tidak memungkinkan bagi dewan pengawas untuk selalu berada di lingkungan organisasi agar selalu mengawasi/memonitor kegiatan organisasinya. Dengan kesibukan yang dimiliki oleh dewan pengawas maka dewan pengawas dituntut untuk dapat menghadiri rapat paling tidak satu bulan sekali agar dapat mengetahui bagaimana perkembangan organisasinya dengan melihat laporan keuangan yang sudah disusun oleh manajer dan diperiksa/diaudit oleh auditor internal/satuan pemeriksa internal. Oleh karena itu peran dewan pengawas dalam mewujudkan *good governance* sangat dibutuhkan, karena apabila sebuah organisasi ingin menjadi tata kelola pemerintahan yang baik maka harus didukung dengan organ-organ di dalamnya yang memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan/mewujudkan tujuan organisasinya yaitu *good governance*.

Satuan pemeriksa internal (SPI) merupakan auditor internal yang dibentuk oleh masing-masing organisasi apabila pola pengelolaan keuangan organisasi tersebut sudah berstatus badan layanan umum. Peran pemeriksa internal yakni menjadi auditor bagi manajer di dalam organisasi. Seorang pemeriksa internal ditugaskan membantu manajer organisasi agar memastikan adanya pengamanan

yang memadai atas keberadaan seluruh aktiva yang dimiliki organisasi, mengaudit laporan keuangan agar mengetahui apabila terjadi kecurangan atas kemungkinan terjadinya penyimpangan, dapat melaksanakan penyidikan pemalsuan, mengelola hubungan yang baik dengan para auditor eksternal selaku pihak yang dapat lebih dipercaya oleh *stakeholder*, terutama dalam masalah kelayakan pertanggung jawaban manajemen, memantau dan menganalisa perkembangan terakhir mengenai kelangsungan hidup dari aktivitas bisnis dan operasional perusahaan. Maka dari itu, satuan pemeriksa internal sangat dibutuhkan dalam mewujudkan *good governance* di dalam organisasi, karena secara tidak langsung pemeriksa internal juga ikut serta membantu manajer dalam membuat laporan keuangan. Pemeriksa internal sebagai pihak yang mengaudit laporan keuangan organisasinya, apabila pemeriksa internal melaksanakan peran/tugasnya dengan maksimal maka tata kelola pemerintahan yang baik pun akan terwujud dalam organisasi.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran variabel (X_1) yaitu Dewan Pengawas dan (X_2) Satuan Pemeriksa Internal (SPI) terhadap variabel (Y) yaitu *Good Governance*. Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian ini adalah seorang dewan pengawas dan sekelompok auditor internal yang disebut sebagai satuan pemeriksa internal (SPI) yang bekerja pada Sekolah Tinggi di lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas berpengaruh terhadap *good governance*. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara dewan pengawas (X_1) terhadap *good governance* (Y), artinya jika peran dewan pengawas bisa dijalankan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tata kelola pemerintah yang baik di organisasi akan meningkat dan lebih baik. Karena dewan pengawas berkewajiban menerapkan peran monitoring yang lebih baik sehingga manajemen atau *agent* akan bertindak lebih hati-hati dan lebih transparan sesuai dengan prinsip *good governance* dalam menjalankan aktivitas bisnis organisasi
2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI) berpengaruh terhadap *good governance*. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara satuan pemeriksa internal

(X_2) terhadap *good governance* (Y), artinya jika peran satuan pemeriksa internal bisa dijalankan dengan baik maka *good governance* akan meningkat. Karena pemeriksa internal berkewajiban membantu manajemen dalam mengawasi jalannya kegiatan operasional organisasinya.

B. Implikasi

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat implikasi penelitian yang timbul diantaranya adalah:

1. Peran dewan pengawas memiliki pengaruh yang penting dalam mewujudkan *good governance* pada sekolah tinggi. Tanpa adanya dewan pengawas, sekolah tinggi tidak dapat mewujudkan *good governance* dengan baik dan benar, karena di dalam menjalankan suatu organisasi dibutuhkan fungsi dewan pengawas guna mengawasi dan memonitori jalannya kegiatan operasional yang ada di sekolah tinggi.
2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI) berperan penting dalam mewujudkan *good governance* di organisasi, karena sebagai sekelompok orang yang fungsinya sebagai pemeriksa internal, SPI dapat membantu direktur dalam mengaudit laporan keuangannya, SPI ikut andil dalam memeriksa kegiatan operasional. Kegiatan apa saja yang semestinya dilakukan supaya tidak terjadi inefisiensi/pemborosan dan tujuan organisasi dapat berjalan secara efektif sebagaimana mestinya.

C. Saran

Dalam melakukan penelitian ini, Sampel yang diambil terbatas hanya pada sekolah tinggi yang berada di lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan, sehingga hasil penelitian ini belum mewakili seluruh sekolah tinggi di Indonesia. Jangka waktu penelitian terlalu singkat sehingga menyulitkan peneliti untuk mendapatkan data dari jumlah responden yang lebih banyak. Dikarenakan dewan pengawas tidak selalu berada di kantor dan anggota SPI juga memiliki kesibukan masing-masing, maka hal ini memakan waktu cukup lama dalam menunggu pengembalian kuesioner. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Akademisi

- a) Bagi penelitian selanjutnya, cakupan sampel dewan pengawas dan SPI yang digunakan sebagai responden sebaiknya diperbesar seperti dewan pengawas dan SPI yang berada pada Sekolah Tinggi yang berada di Indonesia.
- b) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti Direktur, Dewan Penyantun, Koordinator Manajemen Mutu serta pihak-pihak yang mengetahui tugas, wewenang, dan peran pengawasan intern (Pembantu Direktur Bidang Administrasi dan Umum, Kepala Bagian, Kasubbag Akuntansi dan Keuangan, Kepala Biro, Kepala UPT).
- c) Dalam penelitian selanjutnya, pemilihan waktu penyebaran kuesioner sebaiknya dilakukan lebih dari satu bulan karena seperti yang kita ketahui

bahwa dewan pengawas hanya memiliki waktu yang sedikit untuk berada di kantor sehingga dibutuhkan waktu lama untuk pengembalian kuesioner dan kita sebagai peneliti harus berinisiatif untuk mengkonfirmasi kepada pihak kantor dengan cara menelepon untuk menanyakan apakah kuesioner sudah dapat dikembalikan atau belum.

2. Bagi Praktisi

- a) Bagi Sekolah Tinggi, peneliti menyarankan didalam *good governance* dapat lebih efektif dalam menjalankan prosedur serta bertanggungjawab kepada kepentingan *stakeholder* yang disebut manajer. Dengan adanya konflik kepentingan ini, maka informasi yang diterima oleh masing-masing pihak (*stakeholder* dan manajer) menjadi tidak seimbang, sehingga diharapkan agar konflik kepentingan dapat diminimalisir maka perlu diterapkan pengelolaan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) sesuai peraturan perundang-undangan supaya mengurangi penyimpangan yang sering terjadi maka perlu adanya suatu kontrol manajemen dalam organisasi agar pengelolaan keuangannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- b) Bagi Dewan Pengawas dan SPI, diperlukan lagi kesadaran dan motivasi yang lebih tinggi untuk meningkatkan perannya di suatu organisasi. Agar *good governance* yang sesuai peraturan perundang-undangan dapat tercapai dengan baik dan benar, sehingga dewan pengawas dan satuan pemeriksa internal bisa lebih saling bekerjasama lagi guna mewujudkan *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2011. **Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya**. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Chrisdianto, Bernadinus. *Peran Komite Audit dalam Good Corporate Governance. Jurnal Akuntansi Aktual, vol.2, Nomor 1, Januari 2013, hlm.1-8.*
- Dwi Karya Susilawati, Christine. Hendra Soetjipta, Felix. *Peranan Audit Intern dalam Penerapan Good Corporate Governance yang Efektif (Studi Kasus PT. XYZ, Bandung)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Nomor 10 Tahun ke-3 Bulan Mei-Agustus 2013.
- F. Alfred, Kaunang. 2012. **Pedoman Audit Internal**. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Farina, Khoirina dan Hermawan, Ancella. 2013. *Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan Perusahaan, dan Kualitas Audit terhadap Perataan Laba.*
- Ghozali, Imam. 2011. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harayanto, Fajar. 2011. *Peran Komite Audit Dalam Mengoptimalkan Kinerja Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT Pos Indonesia (Persero).*

- Hasan, Iqbal. 2010. **Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)**. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hery. 2013. **240 Konsep Penting Akuntansi dan Auditing**. Jakarta: Gava Media.
- Irianto, Sulistyowati. *Masa Depan Perguruan Tinggi*. www.pelitaui.com/.../masa-depan-perguruan-tinggi.(Diakses tanggal 24 Juni2012).
- Kurnia Lahu, Misya. 2011. *Pengaruh Peranan Audit Internal terhadap Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Jakarta*.
- Kusmayadi, Dedi. 2012. *Determinasi Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance serta Implikasinya Pada Kinerja Bank*. Vol.16, No.1 Januari 2012, hlm. 147-156.
- Megasari, Dewi.2010. *Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Jakarta)*.
- Messier, Glover dan Prawitt. 2010. **Auditing Assurance Services A Systematic Approach**. New York:Mcgraw-Hill.
- Muhi, Ali Hanapiah. *Membangun Good Governance pada Perguruan Tinggi di Indonesia*.
- m.jurnas.com/news/129777/Korupsi-Pesawat-di-STPI-Kejaksanaan-Dalami-Keterlibatan-Pihak-Lain-2014/1/Nasional/Hukum (Diakses tanggal 30 Maret 2014).

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 23 tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 pasal 3 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pramono Sari, Maylia dan Raharja. 2011. *Peran Audit Internal dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia*.

Puspitarini, Noviana Dyah, Sukirman dan Anisykurillah, Indah. 2013. *Peran Satuan Pengawasan Intern (Spi) Dalam Pencapaian Good University Governance (Gug) Pada Perguruan Tinggi Se-Jawa Yang Berstatus Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Pk-Blu)*.

Rewansyah, Asmawi. 2010. **Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance**. Jakarta: CV.Yusaintanas Prima.

Rhiza. *Good university governance: “Sebuah Pemahaman Awal Mengenai Pengertian dan Bagaimana Seharusnya Implikasinya dalam Penyelenggaraan Perguruan Tinggi”*.
www.unhas.ac.id/rhiza/.../good%20university%20governance.doc. (Diakses tanggal 12 November 2011).

- Saptantinah Puji Astuti, Dewi. *Peran Internal Audit dan Komite Audit dalam Mewujudkan Good Corporate Governance*, Jurnal Akutansi dan Sistem Teknologi Informasi, vol. 8, No. 1, April 2010: 1-9.
- Sawyer, B. Lawrence. 2007. **Pemeriksaan Intern**. Jakarta: PPA-STAN.
- Setyaningrum, Dewi dan Diyanty, Vera. 2013. *Analisis Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris terhadap Praktik Real Earning Management*.
- Soetjipta, Hendra Felix. 2013. *Peranan Audit Internal dalam Penerapan Good Corporate Governance yang Efektif (Studi Kasus PT. XYZ, Bandung)*.
- Sumadyo, Dimas. 2013. *Pengaruh Independensi Auditor dan Komite Audit Terhadap Good Corporate Governance (Studi Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Di Wilayah Bandung)*.
- Sukirman Pramono Sari, Maylia. 2012. *Peran Internal Audit Dalam Upaya mewujudkan Good University Governance di UNNES*, Jurnal Dinamika Akuntansi, vol. 4, No.1, Maret 2012, pp. 64-71.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2006. **Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani**. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 2002.
- Tim Penyusun FE UNJ. 2012. **Pedoman Praktek Kerja Lapangan**. Jakarta: FE UNJ.
- Tinambunan, Hotman, Zulfikar, Rudi dan Ibrani Ewing Yuvisa. 2013. *Karakteristik Komite Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*.

Tunggal, Amin Widjaja. 2012. **Pengantar Effective Internal Audit Konsep, Soal Jawab, dan Kasus.** Jakarta: Harvarindo.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Wahyu, Asisda. 2012. *Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah.* Jakarta: Aqsamas Press.

www.borneonews.co.id/index.php/kalteng/kotawaringin/timur/item/11500-terdakwa-korupsi-stie-sampit-ajukan-pembelaan (Diakses tanggal 11 Febuari 2014).

www.bpkp.go.id/sulut/berita/read/9673/0/STAIN-Manado-Sambut-Good-University-Governance.bpkp (Diakses tanggal 9 Januari 2013).

www.pajak.go.id/content/news/kementerian-perhubungan-melatih-bendahara-pengeluaran-agar-mahir-pajak-demi-opini-wtp (Diakses tanggal 25 November 2013).

Zakaria, Zamzulaila, Susela Devi, Selvaraj, Zakaria, Zarina. 2006. *Internal Auditors: Their Role Institutions of Higher Education In Malaysia.*

Zarkasyi, Wahyudin 2008. **Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya.**Bandung: Alfabeta.

Zubaidah, Siti, Achmad, Faradilah dan Jati, Achmad Waluyo. 2013. *Pengaruh Non Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio terhadap Pengungkapan Risiko Keuangan (Studi Pada Industri Perbankan yang Terdaftar di BEI.*

Lampiran 1 Surat Permohonan Kuesioner



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR I: 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bag. UHTP : Telp. 4893726, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 1115/UN39.12/KM/2014 14 April 2014
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penyebaran Kuesioner untuk Skripsi

Yth. BPSDM Kementerian Perhubungan RI

Kami mohon kesediaan Saudara, untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Indah Nurapriani P. No. Telp/HP : 087888585054
Nomor Registrasi : 8335108446
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Untuk Mengadakan : Penyebaran Kuesioner untuk Skripsi

Di : Kementerian Perhubungan RI

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka Penyebaran Kuesioner Skripsi. Skripsi tersebut dengan judul :

"Peran Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksaan Internal Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Sekolah Tinggi di Lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan RI"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan,



Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Kaprog / Jurusan Akuntansi

Drs. Syaifulah
195702161984031001

Lampiran 2 Surat Perizinan Pengisian Kuesioner



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN

JL. MARUNDA MAKMUR
CILINCING, JAKARTA UTARA
JAKARTA 14150

TEL. : (021) 88991618 (Hunting)
http://www.stipjakarta.ac.id
E-Mail : - webmaster@stipjakarta.ac.id

FAX. : (021) 44834345

Nomor : UM.002 / 7 / 1. STIP-14
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Penyampaian Questioner

Jakarta, 12 Mei 2014

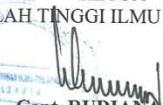
Kepada
Yth. Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan
UNJ

Di

JAKARTA

1. Menunjuk Surat Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UNJ No. 115/UN39.12/KM/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan izin penyebaran kuesioner untuk skripsi, dengan ini disampaikan kuesioner yang telah kami isi untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN


Capt. RUDIANA, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19580519 199303 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
S E M A R A N G
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529



Nomor : UM.002/26/8/PIP.Smg-14 Semarang, 19 Mei 2014
Klasifikasi : -
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Kuisisioner

Kepada
Yth. Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan
UNJ
di
JAKARTA

1. Menunjuk Surat Saudara No. 1115/UN39.12/KM/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan izin penyebaran kuisisioner untuk skripsi dengan ini disampaikan kuisisioner yang telah kami isi unuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG,

M. Cholid Djoahsyah
M. CHOLID DJOHANSYAH, ST. M.Mar.E
Pembina, (IV/a)
NIP. 19570304 198703 1 003



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN**

JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK. G
SUNTER PODOMORO
JAKARTA UTARA 14350

TEL. (021) 6510754
6519773
6519775

FAX. : (021) 6510722
E-mail : bp3ip@cbn.net.id
Website : http://www.bp3ip.ac.id/

Nomor : UM.002/B.42c/BP3IP-2014
Klasifikasi : -
Lampiran : -
Perihal : Kuesioner

Jakarta, 22 April 2014
Kepada

Yth. Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan
UNJ

di

Jakarta

1. Menindaklanjuti Surat Kepala Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UNJ No. 1115/UN39.12/KM/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan izin penyebaran kuesioner untuk skripsi, dengan ini disampaikan kuesioner yang telah kami isi untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

2. Demikian disampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

An. Direktur BP3IP

KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

Ir. BOEDOJO WIWOHO, S.J., M.T.
 Pembina (IV/a)

NIP. 19641218 199103 1 003

Tembusan :
Direktur BP3IP





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

Jl. Semeru No. 3
Tegal - Jawa Tengah
Kode Pos. 52125

Telp : (0283) 351061
Fax : (0283) 358965, 320754, 325220

Email : pktj@yahoo.co.id
Website : www.pktj.ac.id

Nomor : UM.007/2/5 POLTRAN 2014.
Lampiran : 1 bendel.
Perihal : Kuesioner

Tegal, 5 Mei 2014

Kepada :

Yth. Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan
UNJ
di
Jakarta

1. Menunjuk Surat Saudara No. 1115/UN39.12/KM/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan izin penyebaran kuesioner untuk skripsi, terlampir disampaikan kuesioner yang telah kami isi untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
2. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

An. Direktur Politeknik Keselamatan
Transportasi Jalan
Pembantu Direktur II



Dr. RUKMAN, SH., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19590909 198103 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN
SURABAYA

Jl Jemur Andayani 1 No 73
 Surabaya - 60236

Telepon: 031-8410871 031-8472936
 Email : atkp_surabaya@yahoo.co.id
 www.atkpsby.ac.id

Fax : 031-8490005

Nomor : SM.106/7/22/ATKP-SBY-14 Surabaya, 28 April 2014

Lampiran :

Perihal : Penyampaian Kuesioner

Kepada

Yth. Kepala Biro Administrasi
 Akademi dan Kemahasiswaan
 UNJ

di-

SURABAYA

1. Menunjuk surat Saudara No. 1115/UN39.123/KM/2014 tanggal 14 April perihal permohonan izin penyebaran kuesioner untuk skripsi, dengan hormat disampaikan kuesioner yang telah kami isi seperti terlampir, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
2. Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.


DIREKTUR
 Ir. Bambang Wijaya Putra, MM
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19600901 198103 1 001

Lampiran 3 Kuesioner

Jakarta, April 2014

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Responden
Ditempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini, saya mahasiswi Program Studi Akuntansi (S1), Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang pada saat ini sedang melakukan penelitian dalam rangka menyusun tugas akhir (skripsi).

Nama : Indah Nurapriani Putridarwansari

No.Reg : 8335108446

Dalam penyusunan skripsi ini, saya berharap Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner yang saya lampirkan bersama surat ini. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu bekerja Bapak/Ibu.

Pernyataan-pernyataan dibawah ini merupakan pengukuran untuk mengetahui "Peran Dewan Pengawas dan SPI dalam Mewujudkan *Good Governace* pada Sekolah Tinggi di Lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan". Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Peneliti menjamin kerahasiaan identitas seluruh jawaban Bapak/Ibu. Peneliti mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan atas kuesioner ini. Atas perhatian dan kerjasama, peneliti ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Indah Nurapriani Putridarwansari

KUISIONER PENELITIAN

A. Data Responden

1. Nama Responden (*) _____
2. Jabatan (*) _____
3. Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan
4. Usia Responden
 21 – 25 tahun 26 – 30 tahun
 31 – 35 tahun 36 – 40 tahun
 41 – 45 tahun > 45 tahun
5. Lama pengalaman kerja di tempat ini
 0 – 4 tahun 5 – 9 tahun
 10 – 14 tahun > 15 tahun
6. Tingkat Pendidikan formal Anda:
 SMA
 PendidikanPraSarjana (D3)
 PendidikanSarjana (S1)
 Pendidikan Strata (S2)
 Pendidikan Strata (S3)
7. Apakah Anda mempunyai sertifikat/gelar professional lain yang menunjang bidang keahlian.
 Ya, sebutkan
 Tidak

(*) boleh tidak diisi

Paraf

Kuesioner Penelitian

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah sesuai dengan penilaian anda, dimana:

Keterangan	Nilai
SS = Sangat Setuju	5
S = Setuju	4
RG = Ragu-ragu	3
TS = Tidak Setuju	2
STS = Sangat Tidak Setuju	1

No.	Pernyataan	Dewan Pengawas				
		SS	S	RG	TS	STS
1.	Sebagai Dewan Pengawas saya harus bersikap jujur					
2.	Sebagai Dewan Pengawas saya menjunjung tinggi prinsip moral dan etika					
3.	Saya memiliki kemampuan dalam mengawasi seseorang					
4.	Saya selalu menyumbangkan pikiran atau ide mengenai kegiatan yang dilakukan organisasi					
5.	Saya harus mengabdikan diri saya dengan selalu memantau seluruh kegiatan yang terjadi di organisasi					
6.	Saya mampu memahami masalah yang terjadi di organisasi					
7.	Dewan pengawas dituntut untuk dapat mengatasi risiko yang terjadi					
8.	Saya wajib memberikan nasihat atau tanggapan kepada auditor internal berkaitan dengan masalah yang terjadi					
9.	Seorang Dewan Pengawas harus rela berkorban untuk memberikan waktu demi keberhasilan organisasi					
10.	Saya harus melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri					
11.	Sewaktu-waktu saya menyampaikan laporan apabila terjadi penurunan kinerja/berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas					
12.	Dewan pengawas bekerjasama dengan komite audit dan komite lain yang berada					

di bawahnya untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi						
--	--	--	--	--	--	--

No.	Pernyataan	Satuan Pemeriksa Internal (SPI)				
		SS	S	RG	TS	STS
13.	Anggota SPI harus memberikan penilaian yang independen					
14.	Saya tidak boleh memihak antara <i>stakeholder</i> dan manajer					
15.	SPI selalu mempertimbangkan risiko yang terjadi					
16.	SPI dapat memahami kadar dan jenis risiko yang dihadapi organisasi					
17.	SPI secara cepat mengambil tindakan pencegahan atas kemungkinan terjadinya penyimpangan kasus penipuan					
18.	SPI dapat memberi peringatan kepada manajemen puncak mengenai pentingnya isu yang ada					
19.	SPI dalam memberikan pelayanan jasanya harus didasarkan atas kebutuhan sehingga dapat memberikan manfaat bagi organisasi					
20.	Memberikan manfaat bagi organisasi merupakan perhatian utama seluruh audit internal					
21.	Adanya SPI kegiatan yang dilakukan organisasi dapat diawasi dengan lebih baik					
22.	SPI melakukan pengujian, memeriksa lainnya secara sistematis sampai puas bahwa pekerjaan telah dilakukan seperti apa yang diinginkan					
23.	SPI harus memandang suatu kesalahan sebagai suatu yang harus diselesaikan bukan sebagai suatu kejahatan					
24.	SPI berkewajiban untuk memastikan adanya pengamanan yang memadai atas keberadaan seluruh aktiva yang dimiliki organisasi					
25.	SPI memfokuskan pengelolaan risiko yang timbul dari setiap kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai					

26.	SPI dapat memastikan risiko yang telah diidentifikasi dapat dihilangkan /dikurangi					
27.	SPI dapat menjelaskan bagaimana organisasi diarahkan dan dikendalikan agar tujuan organisasi dapat tercapai					

No.	Pernyataan	Good Governance				
		SS	S	RG	TS	STS
28.	Instansi saudara menyediakan informasi organisasi secara tepat waktu dan memadai					
29.	Instansi saudara menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan					
30.	Tetap menjaga kerahasiaan organisasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku berupa hak-hak pribadi setiap karyawan					
31.	Organisasi harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan					
32.	Semua organ di dalam organisasi dan karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam penerapan <i>Good Governane</i>					
33.	Organisasi harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran yang konsisten dengan nilai-nilai intansi					
34.	Melaksanakan tugas dan tanggung jawab semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati					
35.	Seluruh organ di dalam organisasi harus berpegang pada prinsip kehati-hatian					
36.	Seluruh organ di dalam organisasi memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan organisasi					
37.	Melaksanakan tanggung jawab sosial seperti peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan					
38.	Organisasi menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, bebas					

	dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan					
39.	Organisasi melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau saling melempar tanggung jawab					
40.	Sistem pengendalian internal dilakukan secara efektif dalam pengelolaan perusahaan					
41.	Organisasi memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan					
42.	Organisasi memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan organisasi					
43.	Organisasi memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan dan melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik					

Lampiran 4 Uji Validitas

Dewan Pengawas (X₁)

		Correlations														
		satu	dua	tiga	empat	lima	enam	tujuh	delapan	sembilan	sepuluh	sebelas	duabelas	tigabelas	empatbelas	total
satu	Pearson Correlation	1	.561*	.615*	.744**	.741**	.478	.478	.634*	.613*	-.162	.786**	.727**	.209	.241	.846**
	Sig. (2-tailed)		.030	.015	.001	.002	.072	.072	.011	.015	.565	.001	.002	.455	.387	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
dua	Pearson Correlation	.561*	1	.529*	.340	.509	.583*	.583*	.546*	.665**	.093	.463	.464	.180	.519*	.759**
	Sig. (2-tailed)	.030		.042	.214	.053	.023	.023	.035	.007	.742	.082	.081	.521	.047	.001
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tiga	Pearson Correlation	.615*	.529*	1	.648**	.486	.173	.317	.386	.567*	.234	.779**	.399	.151	.349	.749**
	Sig. (2-tailed)	.015	.042		.009	.066	.537	.249	.155	.028	.401	.001	.140	.591	.202	.001
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
empat	Pearson Correlation	.744**	.340	.648**	1	.761**	.319	.119	.231	.814**	.162	.703**	.401	.000	.482	.754**
	Sig. (2-tailed)	.001	.214	.009		.001	.247	.672	.408	.000	.565	.003	.138	1.000	.069	.001
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
lima	Pearson Correlation	.741**	.509	.486	.761**	1	.617*	.446	.509	.610*	.139	.677**	.723**	.000	.675**	.855**
	Sig. (2-tailed)	.002	.053	.066	.001		.014	.096	.053	.016	.621	.006	.002	1.000	.006	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
enam	Pearson Correlation	.478	.583*	.173	.319	.617*	1	.545*	.395	.398	-.185	.283	.687**	.238	.619*	.644**
	Sig. (2-tailed)	.072	.023	.537	.247	.014		.035	.145	.141	.510	.306	.005	.392	.014	.010
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tujuh	Pearson Correlation	.478	.583*	.317	.119	.446	.545*	1	.888**	.217	.123	.142	.472	.238	.413	.603*
	Sig. (2-tailed)	.072	.023	.249	.672	.096	.035		.000	.437	.662	.615	.076	.392	.126	.017
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
delapan	Pearson Correlation	.634*	.546*	.386	.231	.509	.395	.888**	1	.288	.200	.359	.575*	.259	.299	.674**
	Sig. (2-tailed)	.011	.035	.155	.408	.053	.145	.000		.297	.474	.189	.025	.352	.279	.006
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
sembilan	Pearson Correlation	.613*	.665**	.567*	.814**	.610*	.398	.217	.288	1	.294	.526*	.331	.000	.603*	.761**
	Sig. (2-tailed)	.015	.007	.028	.000	.016	.141	.437	.297		.287	.044	.229	1.000	.017	.001
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
sepuluh	Pearson Correlation	-.162	.093	.234	.162	.139	-.185	.123	.200	.294	1	.000	-.232	.000	.559*	.206
	Sig. (2-tailed)	.565	.742	.401	.565	.621	.510	.662	.474	.287		1.000	.404	1.000	.030	.462
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
sebelas	Pearson Correlation	.786**	.463	.779**	.703**	.677**	.283	.142	.359	.526*	.000	1	.624*	.000	.300	.763**
	Sig. (2-tailed)	.001	.082	.001	.003	.006	.306	.615	.189	.044	1.000		.013	1.000	.277	.001
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
duabelas	Pearson Correlation	.727**	.464	.399	.401	.723**	.687**	.472	.575*	.331	-.232	.624*	1	.225	.325	.727**
	Sig. (2-tailed)	.002	.081	.140	.138	.002	.005	.076	.025	.229	.404	.013		.420	.237	.002
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tigabelas	Pearson Correlation	.209	.180	.151	.000	.000	.238	.238	.259	.000	.000	.000	.225	1	.000	.237
	Sig. (2-tailed)	.455	.521	.591	1.000	1.000	.392	.392	.352	1.000	1.000	1.000	.420		1.000	.396
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
empatbelas	Pearson Correlation	.241	.519*	.349	.482	.675**	.619*	.413	.299	.603*	.559*	.300	.325	.000	1	.665**
	Sig. (2-tailed)	.387	.047	.202	.069	.006	.014	.126	.279	.017	.030	.277	.237	1.000		.007
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
total	Pearson Correlation	.846**	.759**	.749**	.754**	.855**	.644**	.603*	.674**	.761**	.206	.763**	.727**	.237	.665**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.001	.001	.000	.010	.017	.006	.001	.462	.001	.002	.396	.007	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Satuan Pemeriksa Internal (X₂)

		Correlations																			
		satu	dua	tiga	empat	lima	enam	tujuh	delapan	sembilan	sepuluh	sebelas	duabelas	tigabelas	empatbelas	limabelas	enambelas	tujuhbelas	delapanbelas	total	
satu	Pearson Correlation	1	.890**	.136	.139	.578*	.367	.578*	.320	.139	.681**	-.237	.367	.419	.650**	.480	.555*	-.110	.338	.551*	
	Sig. (2-tailed)		.009	.630	.622	.024	.179	.024	.245	.622	.005	.396	.179	.120	.009	.070	.032	.697	.217	.033	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
dua	Pearson Correlation	.650**	1	.208	.533*	.642**	.564*	.642**	.492	.533*	.443	.318	.564*	.645**	1.000**	.739**	.213	.337	.276	.797**	
	Sig. (2-tailed)	.009		.456	.041	.010	.029	.010	.062	.041	.098	.248	.029	.009	.000	.002	.446	.219	.319	.000	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tiga	Pearson Correlation	.136	.208	1	.244	.198	.543*	.198	.423	.244	.092	.013	-.150	-.023	.208	.282	.611*	.241	-.019	.411	
	Sig. (2-tailed)	.630	.456		.380	.479	.037	.479	.116	.380	.743	.963	.593	.995	.456	.308	.016	.386	.947	.128	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
empat	Pearson Correlation	.139	.533*	.244	1	.694**	.661**	.694**	.577*	1.000**	-.189	.213	.378	.472	.533*	.866**	.400	.632*	.610*	.828**	
	Sig. (2-tailed)	.622	.041	.380		.004	.007	.004	.024	.000	.500	.446	.165	.075	.041	.000	.140	.011	.016	.000	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
lima	Pearson Correlation	.578*	.642**	.198	.694**	1	.481	1.000**	.396	.694**	.175	.148	.481	.394	.642**	.757**	.463	.366	.671**	.833**	
	Sig. (2-tailed)	.024	.010	.479	.004		.069	.000	.192	.004	.533	.599	.069	.147	.010	.001	.082	.180	.006	.000	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
enam	Pearson Correlation	.367	.564*	.543*	.661**	.481	1	.481	.600*	.661**	.250	-.040	.464	.607*	.564*	.764**	.661**	.598*	.490	.832**	
	Sig. (2-tailed)	.179	.029	.037	.007	.069		.069	.018	.007	.369	.887	.081	.016	.029	.001	.007	.019	.064	.000	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tujuh	Pearson Correlation	.578*	.642**	.198	.694**	1.000**	.481	1	.396	.694**	.175	.148	.481	.394	.642**	.757**	.463	.366	.671**	.833**	
	Sig. (2-tailed)	.024	.010	.479	.004	.000	.069		.069	.018	.007	.369	.887	.081	.016	.029	.001	.082	.180	.006	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
delapan	Pearson Correlation	.320	.492	.423	.577*	.396	.600*	.396	1	.577*	.218	-.123	.055	.491	.492	.667**	.577*	.228	.176	.629**	
	Sig. (2-tailed)	.245	.062	.116	.024	.192	.010	.192		.024	.435	.662	.847	.063	.062	.007	.024	.413	.530	.012	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
sembilan	Pearson Correlation	.139	.533*	.244	1.000**	.694**	.661**	.694**	.577*	1	-.189	.213	.378	.472	.533*	.866**	.400	.632*	.610*	.828**	
	Sig. (2-tailed)	.622	.041	.380	.000	.004	.007	.004	.024		.500	.446	.165	.075	.041	.000	.140	.011	.016	.000	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
sepuluh	Pearson Correlation	.681**	.443	.082	-.189	.175	.250	.175	.218	-.189	1	-.161	.250	.286	.443	.327	.378	-.298	-.202	.242	
	Sig. (2-tailed)	.005	.098	.743	.500	.533	.369	.533	.435	.500		.566	.369	.302	.089	.234	.165	.279	.471	.386	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
sebelas	Pearson Correlation	-.237	.318	.013	.213	.148	-.040	.148	-.123	.213	-.161	1	.262	.040	.318	.123	-.426	.337	.033	.182	
	Sig. (2-tailed)	.396	.248	.963	.446	.599	.887	.599	.662	.446	.566		.346	.887	.248	.662	.113	.219	.909	.494	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
duabelas	Pearson Correlation	.367	.564*	-.150	.378	.401	.464	.401	.055	.378	.250	.262	1	.607*	.564*	.491	.094	.598*	.490	.608*	
	Sig. (2-tailed)	.179	.029	.593	.165	.069	.081	.069	.847	.165	.369	.346		.016	.029	.063	.738	.019	.064	.016	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tigabelas	Pearson Correlation	.419	.645**	-.023	.472	.394	.607*	.394	.491	.472	.206	.040	.607*	1	.645**	.600*	.109	.299	.375	.644**	
	Sig. (2-tailed)	.120	.009	.935	.075	.147	.016	.147	.063	.075	.302	.887	.016		.009	.010	.500	.279	.169	.010	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
empatbelas	Pearson Correlation	.650**	1.000**	.200	.533*	.642**	.564*	.642**	.492	.533*	.443	.318	.564*	.645**	1	.739**	.213	.337	.276	.797**	
	Sig. (2-tailed)	.009	.000	.456	.041	.010	.029	.010	.062	.041	.089	.248	.029	.009		.002	.446	.219	.319	.000	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
limabelas	Pearson Correlation	.480	.739**	.282	.866**	.757**	.764**	.757**	.667**	.866**	.327	.123	.491	.600*	.739**	1	.577*	.456	.404	.920**	
	Sig. (2-tailed)	.070	.002	.308	.000	.001	.001	.001	.007	.000	.234	.862	.063	.018	.002		.024	.087	.067	.000	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
enambelas	Pearson Correlation	.555*	.213	.611*	.400	.463	.661**	.463	.577*	.400	.378	-.426	.094	.109	.213	.577*	1	.158	.381	.592*	
	Sig. (2-tailed)	.032	.446	.016	.140	.092	.007	.092	.024	.140	.165	.113	.738	.500	.446	.024		.574	.161	.020	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tujuhbelas	Pearson Correlation	-.110	.337	.241	.632*	.366	.598*	.366	.228	.632*	-.299	.337	.598*	.299	.337	.456	.158	1	.422	.599*	
	Sig. (2-tailed)	.697	.219	.306	.011	.180	.019	.180	.413	.011	.279	.219	.019	.279	.219	.087	.574		.117	.018	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
delapanbelas	Pearson Correlation	.338	.276	-.019	.610*	.671**	.490	.671**	.176	.610*	-.202	.033	.490	.375	.276	.404	.381	.422	1	.628**	
	Sig. (2-tailed)	.217	.319	.947	.016	.006	.064	.006	.530	.016	.471	.908	.064	.169	.319	.067	.161	.117		.012	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
total	Pearson Correlation	.551*	.797**	.411	.828**	.833**	.832**	.833**	.629*	.828**	.242	.192	.608*	.644**	.797**	.920**	.592*	.599*	.628**	1	
	Sig. (2-tailed)	.033	.000	.128	.000	.000	.000	.000	.012	.000	.386	.494	.016	.010	.000	.000	.020	.018		.012	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Good Governance (Y)

		Correlations																		
		satu	dua	tiga	empat	lima	enam	tujuh	delapan	sembilan	sepuluh	sebelas	duabelas	tigabelas	empatbelas	limabelas	enambelas	tujuhbelas	delapanbelas	total
satu	Pearson Correlation	1	.707**	.075	1.000**	.535*	.452	.272	.535*	1.000**	.294	.784**	.612*	.829**	1.000**	.294	.829**	.535*	.583*	.915**
	Sig. (2-tailed)		.003	.709	.000	.040	.091	.326	.040	.000	.207	.001	.015	.000	.000	.207	.000	.040	.022	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
dua	Pearson Correlation	.707**	1	-.107	.707**	.472	.213	.000	.378	.707**	.555*	.555*	.289	.535*	.707**	.555*	.853**	.472	.707**	.444**
	Sig. (2-tailed)	.003		.705	.003	.075	.446	1.000	.165	.003	.032	.032	.297	.041	.003	.032	.000	.075	.003	.001
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tiga	Pearson Correlation	.075	-.107	1	.075	-.262	.659**	.431	.443	.075	.207	-.207	.431	-.023	.075	.207	-.023	-.262	.075	.252
	Sig. (2-tailed)	.789	.705		.789	.348	.008	.109	.098	.789	.459	.459	.109	.936	.789	.459	.936	.348	.789	.384
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
empat	Pearson Correlation	1.000**	.707**	.075	1	.535*	.452	.272	.535*	1.000**	.294	.784**	.612*	.829**	1.000**	.294	.829**	.535*	.583*	.915**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.789		.040	.091	.326	.040	.000	.287	.001	.015	.000	.000	.287	.000	.040	.022	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
lima	Pearson Correlation	.535*	.472	-.262	.535*	1	.040	-.218	.386	.535*	.419	.419	.055	.342	.535*	.419	.845**	1.000**	.535*	.593*
	Sig. (2-tailed)	.040	.075	.346	.040		.887	.435	.302	.040	.120	.120	.847	.211	.040	.120	.009	.000	.040	.020
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
enam	Pearson Correlation	.452	.213	.659**	.452	.040	1	.431	.443	.452	.207	-.207	.739**	.318	.452	.207	.318	.040	.452	.575*
	Sig. (2-tailed)	.091	.446	.008	.091	.887		.109	.098	.091	.459	.459	.002	.248	.091	.459	.248	.887	.091	.025
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tujuh	Pearson Correlation	.272	.000	.431	.272	-.218	.431	1	.327	.272	.080	.480	.444	.123	.272	.080	.123	-.218	-.068	.329
	Sig. (2-tailed)	.326	1.000	.109	.326	.435	.109		.234	.326	.777	.070	.097	.662	.326	.777	.662	.435	.010	.232
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
delapan	Pearson Correlation	.535*	.378	.443	.535*	.286	.443	.327	1	.535*	.881**	.881**	.327	.443	.535*	.881**	.443	.286	.535*	.839**
	Sig. (2-tailed)	.040	.165	.088	.040	.302	.088	.234		.040	.005	.005	.234	.088	.040	.005	.088	.302	.040	.004
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
sembilan	Pearson Correlation	1.000**	.707**	.075	1.000**	.535*	.452	.272	.535*	1	.294	.784**	.612*	.829**	1.000**	.294	.829**	.535*	.583*	.915**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.789	.000	.040	.091	.326	.040		.287	.001	.015	.000	.000	.287	.000	.040	.022	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
sepuluh	Pearson Correlation	.294	.555*	.207	.294	.419	.207	.080	.681**	.294	1	.423	.080	.207	.294	1.000**	.650**	.419	.784**	.603*
	Sig. (2-tailed)	.287	.032	.459	.287	.120	.459	.777	.005	.287		.116	.777	.459	.287	.000	.009	.120	.001	.017
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
sebelas	Pearson Correlation	.784**	.555*	.207	.784**	.419	.207	.080	.681**	.784**	.423	1	.480	.650**	.784**	.423	.650**	.419	.784**	.784**
	Sig. (2-tailed)	.001	.032	.459	.001	.120	.459	.070	.005	.001	.116		.070	.009	.001	.116	.009	.120	.287	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
duabelas	Pearson Correlation	.612*	.289	.431	.612*	.055	.739**	.444	.327	.612*	.080	.480	1	.739**	.612*	.080	.431	.055	.272	.847**
	Sig. (2-tailed)	.015	.297	.109	.015	.847	.002	.097	.234	.015	.777	.070		.002	.015	.777	.109	.847	.326	.009
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tigabelas	Pearson Correlation	.829**	.533*	-.023	.829**	.342	.318	.123	.443	.829**	.207	.650**	.739**	1	.829**	.207	.650**	.342	.452	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000	.041	.936	.000	.211	.240	.662	.080	.000	.459	.009	.002		.000	.459	.000	.211	.091	.001
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
empatbelas	Pearson Correlation	1.000**	.707**	.075	1.000**	.535*	.452	.272	.535*	1.000**	.294	.784**	.612*	.829**	1	.294	.829**	.535*	.583*	.915**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.709	.000	.040	.091	.326	.040	.000	.207	.001	.015	.000		.207	.000	.040	.022	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
limabelas	Pearson Correlation	.294	.555*	.207	.294	.419	.207	.080	.881**	.294	1.000**	.423	.080	.207	.294	1	.850**	.419	.784**	.803*
	Sig. (2-tailed)	.287	.032	.459	.287	.120	.459	.777	.005	.287	.000	.116	.777	.459	.287		.009	.120	.001	.017
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
enambelas	Pearson Correlation	.029**	.053*	-.023	.029**	.645**	.310	.123	.443	.029**	.650**	.650**	.431	.650**	.029**	.650**	1	.645**	.029**	.080*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.936	.000	.009	.248	.662	.098	.000	.009	.009	.109	.008	.000	.009		.009	.000	.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
tujuhbelas	Pearson Correlation	.535*	.472	-.262	.535*	1.000**	.040	-.218	.386	.535*	.419	.419	.055	.342	.535*	.419	.845**	1	.535*	.583*
	Sig. (2-tailed)	.040	.075	.346	.040	.000	.887	.435	.302	.040	.120	.120	.847	.211	.040	.120	.009		.040	.020
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
delapanbelas	Pearson Correlation	.583*	.707**	.075	.583*	.535*	.452	-.088	.535*	.583*	.784**	.294	.272	.452	.583*	.784**	.829**	.535*	1	.753**
	Sig. (2-tailed)	.022	.003	.789	.022	.040	.091	.810	.040	.022	.001	.287	.326	.091	.022	.001	.000	.040		.001
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
total	Pearson Correlation	.915**	.744**	.262	.915**	.593*	.575*	.329	.887**	.915**	.803*	.794**	.847**	.752**	.915**	.803*	.886**	.593*	1	.753**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.384	.000	.020	.025	.232	.004	.000	.017	.000	.009	.001	.000	.017	.000	.020		.001
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 5 Uji Reliabilitas**Dewan Pengawas (X₁)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.922	12

Satuan Pemeriksa Internal (X₂)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.937	15

Good Governance (Y)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.945	16

Lampiran 6 Data Kuesioner

Dewas (X₁)

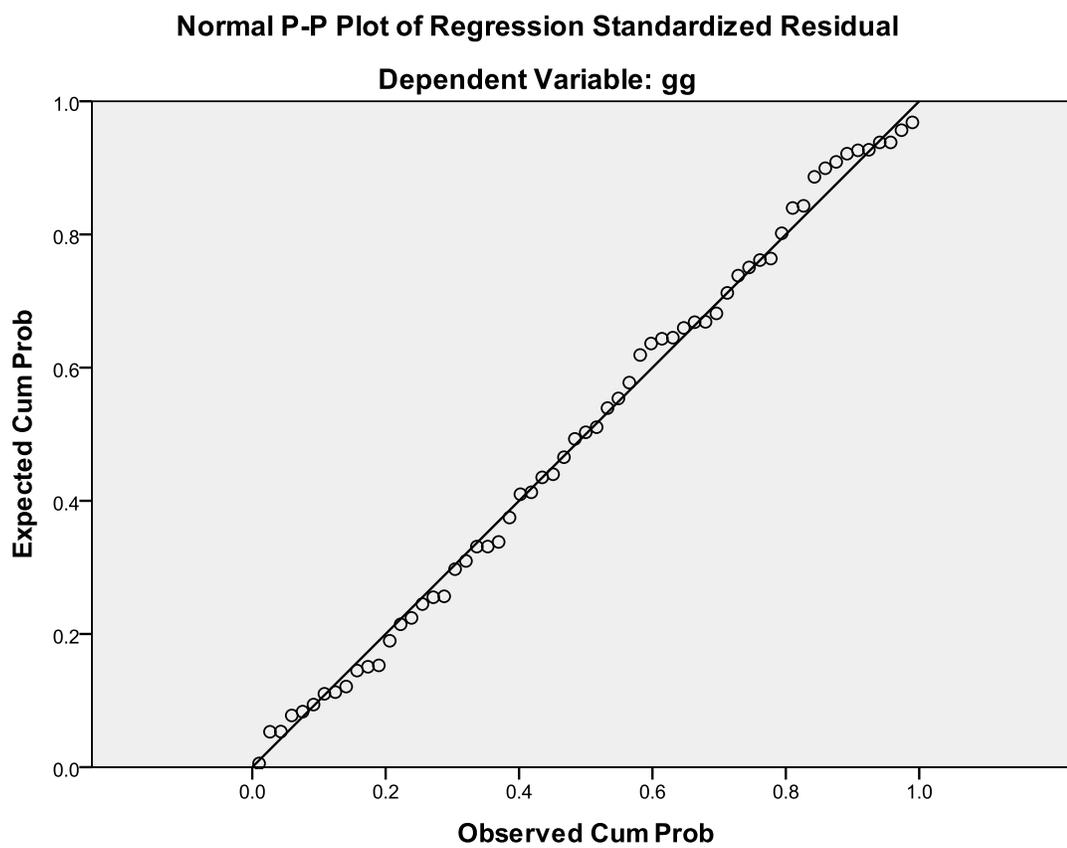
Responden	No. Soal												total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	4	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	4	55
2	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	56
3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	54
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	49
5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	52
6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	51
7	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	54
8	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	52
9	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	57
10	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	46
11	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	51
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	47
13	5	3	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	55
14	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	48
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	47
16	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	58
17	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	3	51
18	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	3	53
19	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	51
20	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	52
21	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	3	52
22	4	4	5	4	4	5	4	4	4	3	4	5	50
23	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	57
24	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	52
25	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	53
26	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	58
27	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	3	52
28	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	3	53
29	4	4	4	5	4	4	3	5	4	5	4	4	50
30	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	5	49
31	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	3	50
32	4	5	5	4	4	5	4	4	4	3	4	5	51
33	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	56
34	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	52
35	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	54
36	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	55
37	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	57
38	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	54
39	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	49
40	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	52
41	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	51
42	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	54
43	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	54
44	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	56
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	47
46	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	51
47	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	48
48	5	4	4	5	5	5	3	4	5	5	5	5	55
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	47
50	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	51
51	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	54
52	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	56
53	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	53
54	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	56
55	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	46
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	47
57	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
58	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	3	51
59	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	3	52
60	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	56
61	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	51
	273	261	268	271	262	267	254	271	274	274	256	259	

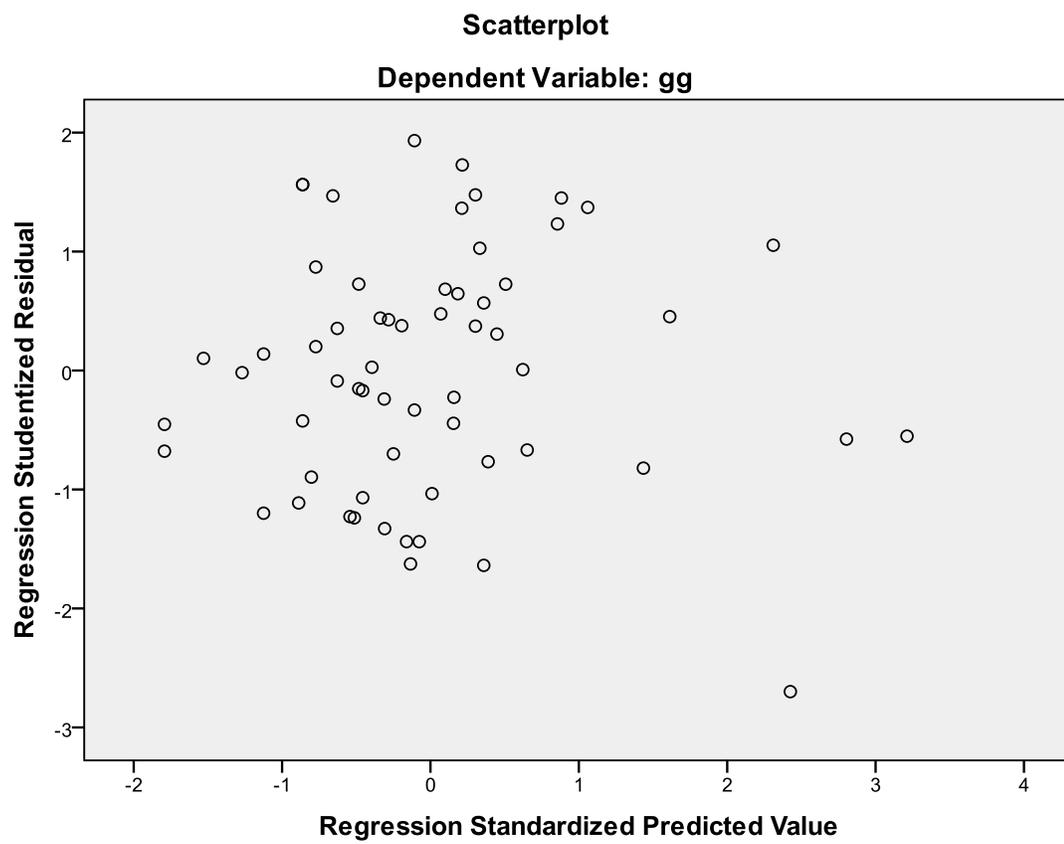
SPI (X₂)

Responden	No. Soal																total
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58	
2	3	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	64	
3	3	5	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	57	
4	4	4	4	4	3	5	4	4	5	4	4	4	3	4	4	60	
5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	55		
6	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	3	4	5	60	
7	4	3	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	62	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	61	
9	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	3	4	4	4	4	64	
10	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4	5	5	69	
11	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	67	
12	5	4	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	67	
13	4	4	5	4	4	3	4	5	4	4	4	4	5	4	4	62	
14	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	2	5	4	4	4	62	
15	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	69	
16	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	70	
17	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	65	
18	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	59	
19	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	63	
20	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	61	
21	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	72	
22	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	67	
23	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	74	
24	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	66	
25	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59	
26	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	66	
27	3	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	62	
28	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58	
29	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	65	
30	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	57	
31	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	63	
32	3	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	60	
33	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	5	54	
34	4	4	5	4	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	63	
35	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	57	
36	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	64	
37	3	5	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	57	
38	4	4	4	4	3	5	4	4	5	4	4	4	3	4	4	60	
39	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	57	
40	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	3	4	5	60	
41	4	3	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	62	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	61	
43	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	3	4	4	4	4	64	
44	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	73	
45	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	67	
46	5	4	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	67	
47	4	4	5	4	4	3	4	5	4	4	4	4	5	4	4	62	
48	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	2	5	4	4	4	62	
49	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	69	
50	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	70	
51	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	65	
52	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	
53	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	63	
54	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	61	
55	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	72	
56	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	68	
57	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	74	
58	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	66	
59	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	65	
60	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	62	
61	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	
	1891	243	266	264	244	246	264	258	264	268	260	257	259	259	254		

Good Governance (Y)

Responden	No. Soal																Total
	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
1	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	70
2	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	78
3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	73
4	4	4	4	4	4	5	5	3	5	5	5	4	4	4	4	4	68
5	4	4	4	5	4	5	3	5	5	4	4	4	5	4	4	4	68
6	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	67
7	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	5	5	5	74
8	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	73
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	79
10	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	69
11	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	74
12	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	69
13	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	78
14	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	69
15	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	69
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80
17	4	3	4	4	5	5	4	4	4	3	4	4	5	4	5	4	66
18	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	69
19	4	3	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	72
20	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	69
21	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	70
22	4	4	3	4	5	5	5	3	4	4	5	5	4	5	4	5	69
23	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	74
24	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	68
25	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	71
26	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	76
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	65
29	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	72
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	65
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
32	5	5	3	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	76
33	5	4	4	4	3	4	3	5	5	4	3	4	4	4	3	5	64
34	5	4	4	4	3	4	3	4	5	4	3	4	5	4	3	4	63
35	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	70
36	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	69
37	5	4	4	4	4	4	3	4	5	4	3	4	4	4	4	4	64
38	4	4	3	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	67
39	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	64
40	5	5	3	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	76
41	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	64
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
43	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	5	73
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	5	5	5	1	64
45	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	65
46	4	4	4	4	4	5	5	2	4	3	4	5	4	4	5	3	64
47	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	63
48	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	73
49	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	79
50	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	79
51	5	5	5	4	4	4	4	3	5	5	4	4	5	5	5	5	72
52	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	70
53	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	73
54	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	76
55	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	77
56	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	72
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	75
58	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	74
59	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	79
60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	75
61	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	76
	270	271	270	278	273	273	266	256	280	261	267	265	271	270	271	270	

Lampiran 7**P-Plot Normalitas**

Lampiran 8**Scatterplot**

RIWAYAT HIDUP



Indah Nurapriani Putridarwansari, lahir di Magelang 16 April 1992. Anak kedua dari pasangan H.Wawan Darwan, SH., MH yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Hj. Siti Rokhayati sebagai Pegawai Negeri Sipil. Memiliki satu kakak laki-laki bernama Rio Hakim Dharmawan, ST. Bertempat tinggal di Jalan Pulau Buton Raya No. 236 RT 05 RW 017 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur

Perumnas III Bekasi Timur. Pendidikan formal yang ditempuh, SDN Aren Jaya XVIII Bekasi (1999 – 2004); SMP Negeri 3 Bekasi (2004 – 2007); SMA Negeri 1 Bekasi (2007 – 2010); Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi (2010 – 2014).

Penulis adalah orang yang aktif dalam kegiatan organisasi. Keaktifannya sudah dimulai sejak penulis duduk di bangku SMP, dimana penulis terdaftar sebagai anggota dan aktif di PMR SMP Negeri 3 Bekasi. Ketika di bangku SMA, penulis aktif dalam kegiatan ekstra kulikuler paskibra, pramuka, paduan suara dan sebagai penanggungjawab acara serta bendahara pada acara Pentas Seni di SMA Negeri 1 Bekasi. Kemudian di bangku perkuliahan, penulis pernah mengikuti kegiatan kepanitiaan seperti menjadi panitia kegiatan AC-DC yang diselenggarakan oleh Jurusan Akuntansi dan pernah menjadi anggota BPM (Badan Pengawas Mahasiswa).